



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI ISO 26000 DAN PELAPORAN SERTA
PENGUNGKAPAN BERDASARKAN STANDAR *GLOBAL
REPORTING INITIATIVE*
(Studi Kasus Pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk)**

TESIS

**RIFEALD ROMAULI
1006795200**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI ISO 26000 DAN PELAPORAN SERTA
PENGUNGKAPAN BERDASARKAN STANDAR *GLOBAL
REPORTING INITIATIVE*
(Studi Kasus Pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk)**

TESIS

**Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Akuntansi**

**RIFEALD ROMAULI
1006795200**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rifeald Romauli

NPM : 1006795200

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Juni 2012



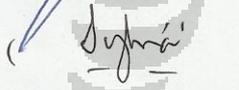
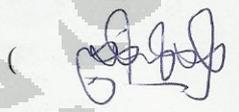
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rifeald Romauli
NPM : 1006795200
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Implementasi ISO 26000 dan Pelaporan Serta
Pengungkapan Berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative*
Studi Kasus pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Chaerul D. Djakman ()
Penguji : Dr. Sylvia Veronica NPS ()
Penguji : Rafika Yuniasih, MSM ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juni 2012

Mengetahui,
Ketua Program


Prof. Dr. Lmdawati Gani, CMA
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus akhirnya penulisan karya akhir ini dapat selesai. Penulisan karya akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Manajemen dan Pengendalian pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan karya akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

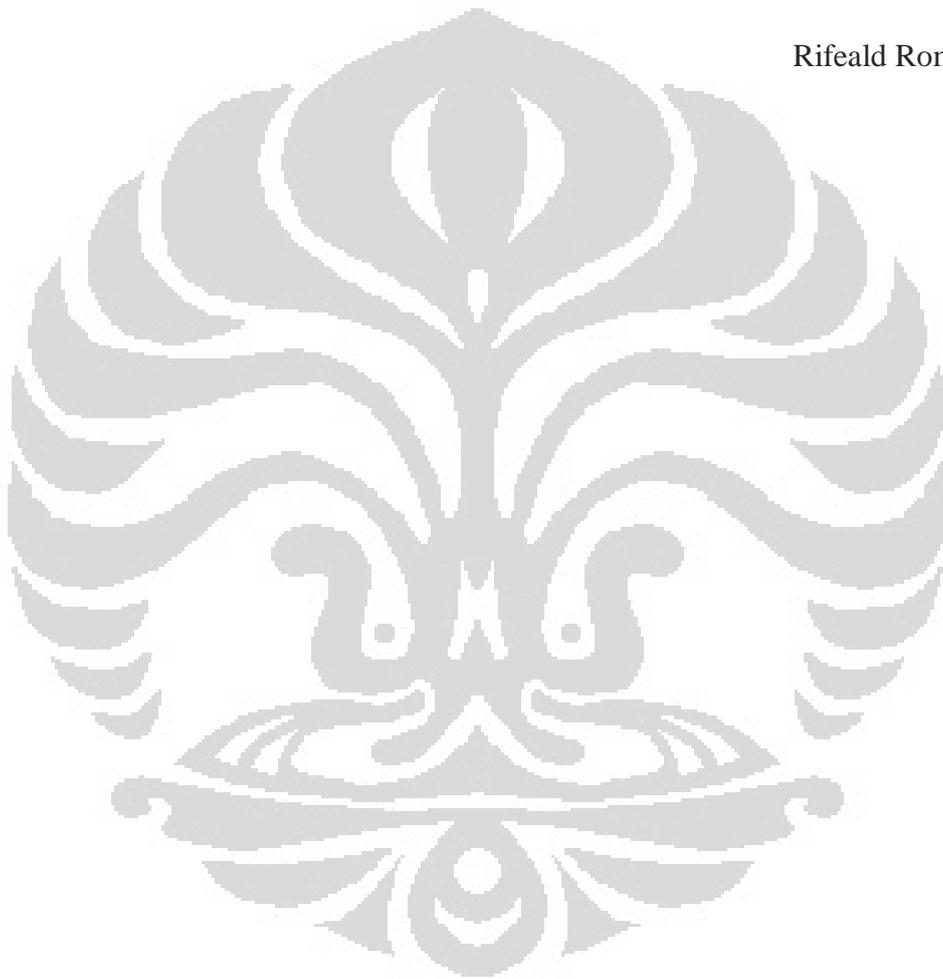
1. Ketua program studi MAKSI-PPAk Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA.
2. Bapak Dr. Chaerul D. Djakman, selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan karya akhir ini ditengah-tengah kesibukannya yang padat.
3. PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk atas kesediannya sebagai tempat penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya akhir ini.
4. Bapak Arifin. W, Ibu Estetia, Bapak Aldio dari pihak Indah Kiat, dan Bapak Wilson Siahaan dari pihak APP atas waktu dan bantuannya selama mengumpulkan data yang dibutuhkan.
5. Kedua orang tua saya Drs. Martua Sinaga, MM dan Elfrida Sagala atas dukungan doa, kesabaran, serta bantuan materil selama masa perkuliahan.
6. Putraku tersayang M. Nathanael Sihombing.
7. Kedua adik tercinta Andry Parulian Sinaga, SH dan Rudolfo C.H Sinaga yang tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, doa serta semangat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh keluarga besar Sinaga dan Sagala yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
9. Teman-teman Magister Akuntansi A-101P “GeJers” atas dukungan, motivasi, serta bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf sekretariat dan perpustakaan MAKSI-PPAk.

12. Kepada semua pihak yang tidak tercantum pada lembaran ini yang telah membantu terwujudnya penelitian ini.

Akhir kata saya berharap karya akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 18 Juni 2012

Rifeald Romauli



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifeald Romauli
NPM : 1006795200
Program Studi: Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

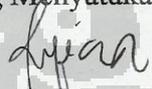
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi ISO 26000 dan Pelaporan Serta Pengungkapan Berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative* (Studi Kasus Pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Juni 2012
Yang Menyatakan


(Rifeald Romauli)

ABSTRAK

Nama : Rifeald Romauli
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Implementasi ISO 26000 dan Pelaporan Serta Pengungkapan Berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative* (Studi Kasus pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk)

Tesis ini membahas mengenai implementasi ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pelaporan serta pengungkapan kegiatan CSR sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. Dasar yang digunakan oleh Indah Kiat dalam melaksanakan kegiatan CSR adalah visi dan misi perusahaan menjadi produsen bubur kertas (*pulp*) dan kertas nomor satu di dunia dengan memberikan yang terbaik bagi *stakeholder* serta berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Untuk menjalankan kegiatan CSR sesuai dengan visi dan misi perusahaan, Indah Kiat menggunakan ISO 26000 sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan CSR dengan memenuhi prinsip-prinsip CSR dan tujuh subjek inti yang terkandung pada ISO 26000. Untuk menghindari adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan *stakeholder*, kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilakukan kemudian dilaporkan dan diungkapkan melalui *annual report* dan *sustainability report* yang diterbitkan bersama dengan Asia Pulp and Paper sesuai dengan standar GRI. Dengan pelaksanaan kegiatan CSR dan pelaporan serta pengungkapan ini, Indah Kiat telah menunjukkan perilaku etis dengan menghormati kepentingan *stakeholder* yang dimiliki perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap kemudahan perusahaan untuk menembus pasar Internasional.

Kata kunci:

Corporate Social Responsibility (CSR), ISO 26000, asimetri informasi, *Global Reporting Initiative* (GRI).

ABSTRACT

Name : Rifeald Romauli
Study Program : Magister Akuntansi
Title : Implementation of ISO 26000 and Reporting and Disclosure Based On Global Reporting Initiative Standard (Case Study on PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk)

This thesis discusses implementation of ISO 26000 as guidance of Corporate Social Responsibility (CSR) activities, reporting and disclosure CSR activities according to Global Reporting Initiative (GRI) standard. Vision and mission to become number one pulp and paper manufacturer in the world and committed to conducting its business sustainable by giving superior value for stakeholders is used as the basis of CSR program. Indah Kiat using ISO 26000 to run the CSR activities by fulfill CSR principles and seven core subject contained in ISO 26000. To prevent the occurrence of asymmetric information between company and stakeholder, CSR activities that have been made then reports and disclosed through Indah Kiat's annual report and sustainability report issued together with Asia Pulp and Paper according to GRI standards. With this ISO 26000 implementation, reporting, and disclosure of CSR activities, Indah Kiat has demonstrated ethical behavior with respect for stakeholder's interest and enhances the corporate image which has an impact on the ease of the company to break through the international market.

Keywords:

Corporate Social Responsibility (CSR), ISO 26000, asymmetric information, Global Reporting Initiative (GRI).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Agensi	8
2.1.1 <i>Corporate Governance</i> (CG)	9
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	9
2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	11
2.2.1 Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	11
2.2.2 Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	15
2.2.3 Jenis-jenis <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	17
2.2.4 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	24
2.3 Pedoman Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	26
2.4 Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	32
2.5 Pelaporan dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) ..	34
2.6 Menerapkan Panduan GRI Bersama Dengan ISO 26000	38
2.7 Strategi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	39
3. PROFIL PERUSAHAAN	41
3.1 Profil PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	41
3.1.1 Sejaah Perusahaan	41
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	42
3.2 Tata Kelola Perusahaan	43
3.3 Bidang Usaha dan Jenis Produk	45
3.4 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	46
3.5 <i>Sustainability Report</i> (SR)	47
3.5.1 Pendataan Emisi Karbon	48
3.5.2 Pendataan Kontribusi Dampak Sosial	49

4. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	50
4.1 Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.....	50
4.1.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Menurut ISO 26000	50
4.1.2 Pemetaan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>).....	52
4.2 Implementasi ISO 26000	53
4.2.1 Tata Kelola Organisasi.....	53
4.2.2 Hak Asasi Manusia	55
4.2.3 Praktik Ketenagakerjaan	60
4.2.4 Lingkungan.....	67
4.2.5 Praktik Operasi yang Adil.....	73
4.2.6 Konsumen.....	76
4.2.7 Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat	80
5. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	86
5.3 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

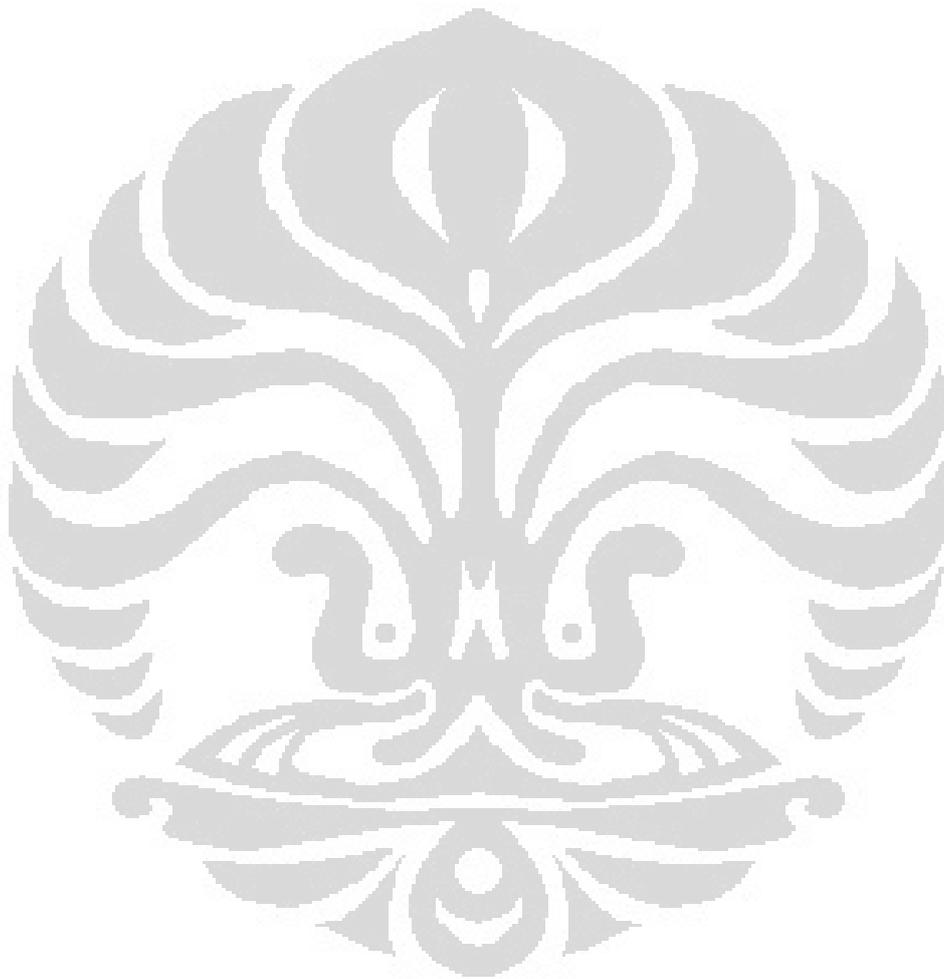
Gambar 2.1 <i>Triple Bottom Lines</i>	13
Gambar 2.2 <i>Carroll's Pyramid</i>	17
Gambar 4.1 Pemetaan <i>Stakeholder</i> PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Anak Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	42
Tabel 4.1	Implementasi Tata Kelola Organisasi dan Indikator Kinerja GRI	54
Tabel 4.2	Implementasi Hak Asasi Manusia Isu <i>Avoidance of Complicity</i> dan Indikator Kinerja GRI	56
Tabel 4.3	Implementasi Hak Asasi Manusia Isu <i>Due Diligence</i> serta Isu <i>Discrimination and Vulnerable Group</i> dan Indikator Kinerja GRI ...	57
Tabel 4.4	Implementasi Hak Asasi Manusia Isu <i>Human Rights Risk Situation</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	58
Tabel 4.5	Implementasi Hak Asasi Manusia Isu <i>Civil and Political Rights</i> dan Indikator Kinerja GRI	59
Tabel 4.6	Implementasi Hak Asasi Manusia Isu <i>Fundamental Principles and Rights at Work</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	59
Tabel 4.7	Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu Pekerja dan Hubungan Ketenagakerjaan serta Isu Dialog Sosial dan Indikator Kinerja GRI	61
Tabel 4.8	Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu <i>Health and Safety at Work</i> dan Indikator Kinerja GRI	62
Tabel 4.9	Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu Kondisi Kerja dan Jaminan Sosial Pekerja dan Indikator Kinerja GRI.....	64
Tabel 4.10	Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu <i>Human Development and Training in Work Place</i> dan Indikator Kinerja GRI	65
Tabel 4.11	Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu Pekerja dan Hubungan Ketenagakerjaan dan Indikator Kinerja GRI.....	66
Tabel 4.12	Implementasi Lingkungan Isu <i>Sustainable Resource Use</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	67
Tabel 4.13	Implementasi Lingkungan Isu <i>Protection Environment</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	69
Tabel 4.14	Implementasi Lingkungan Isu <i>Prevention and Pollution</i> Serta Isu <i>Climate Change Mitigation and Adaption</i> dan Indikator Kinerja GRI	72
Tabel 4.15	Implementasi Praktik Operasi yang Adil Isu <i>Anti-corruption</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	74
Tabel 4.16	Implementasi Praktik Operasi yang Adil Isu <i>Respect for Property Rights</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	75
Tabel 4.17	Implementasi Konsumen Isu <i>Consumer Service, Support, Complaint and Dispute Resolution</i> dan Indikator Kinerja GRI	76
Tabel 4.18	Implementasi Konsumen Isu <i>Protecting Consumer's Health and Safety</i> dan Indikator Kinerja GRI	77
Tabel 4.19	Implementasi Konsumen Isu <i>Fair Marketing, Factual and Unbiased Information, and Fair Contractual Practices</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	79
Tabel 4.20	Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu <i>Education and Culture</i> dan Indikator Kinerja GRI	81
Tabel 4.21	Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu <i>Health</i> dan Indikator Kinerja GRI	82

Tabel 4.22 Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu <i>Employment Creation and Skills</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	83
Tabel 4.23 Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu <i>Technology Development and Access Serta Social Investment</i> dan Indikator Kinerja GRI.....	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Indikator Kinerja Ekonomi <i>Global Reporting Initiative</i>	93
Lampiran 2: Indikator Kinerja Lingkungan <i>Global Reporting Initiative</i>	94
Lampiran 3: Indikator Kinerja Sosial <i>Global Reporting Initiative</i>	96
Lampiran 4: Kebijakan Tenaga Kerja.....	101
Lampiran 5: <i>California Transparency Law</i>	103
Lampiran 6: Deklarasi <i>Sustainability</i>	104
Lampiran 7: Kebijakan Legalitas.....	107



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi pada tahun 1997 di negara-negara Asia dan kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia seperti Enron Corporation dan WorldCom di Amerika Serikat merupakan awal perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* (GCG). Krisis yang terjadi dan kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa tersebut dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance*.

Terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia secara jelas menyatakan salah satu tujuan diterapkannya pedoman ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menjadi acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaannya terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan (KNKG, 2006).

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan perlu mengungkapkan kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan (*disclosure*) terhadap aspek-aspek *social, ethical, environmental, dan sustainability* sekarang ini menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan akuntabilitas dan transparansinya kepada *stakeholder*. Panduan ISO 26000 juga menekankan pentingnya pelaporan publik untuk kinerja CSR kepada *stakeholder* internal maupun eksternal perusahaan.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

- a. Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 tahun 1997 pasal 66 ayat (2) bagian c yang menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan,

perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- b. Pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Suatu laporan dinilai bermutu apabila penyusunannya berpedoman pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang berterima umum, sama halnya dengan laporan keberlanjutan. Pada tingkat global sejak tahun 2000 telah dikembangkan standar laporan berkelanjutan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan baik itu dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggungjawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat (Kiroyan, 2006).

Menurut Abidin (2006), aktivitas CSR telah dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab aktivitas dan strategi untuk menjamin keberlangsungan hidup, implementasi nilai-nilai perusahaan dan aktivitas yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Beragamnya isu sosial yang menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat dan adanya keterbatasan pada perusahaan, seperti kemampuan finansial dan sumber daya manusia menghadapkan perusahaan pada tugas untuk

memilih isu sosial yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan CSR.

Perusahaan saat ini terus menerus menaruh perhatian pada berbagai kegiatan CSR. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan berbagai perusahaan terus berlomba dalam merencanakan program-program sosialnya guna menarik hati publik. Alasan hukum juga menjadi salah satu alasan perusahaan dalam melakukan program CSR terlebih lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 pasal 74 yang isinya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap sumber daya alam dan yang menghasilkan limbah. Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

- a. Ayat 1 dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Ayat 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Ayat 3 menggariskan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pedoman yang dapat dipakai oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR adalah ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* yang telah diluncurkan oleh ISO (*International Organization for Standardization*) pada tanggal 1 November 2010 setelah disetujui oleh 93% negara anggota ISO yang memilih termasuk Indonesia. ISO sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR di berbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan

disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman CSR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia (Jalal, 2010).

Prinsip-prinsip CSR dalam ISO 26000 adalah akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan *stakeholder*, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan kepada norma perilaku internasional, dan penegakan hak asasi manusia. Terdapat tujuh subjek inti yang perlu diperhatikan dalam menerapkan ISO 26000 yaitu tata kelola organisasi, hak-hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, konsumen, dan pelibatan serta pengembangan masyarakat (Jalal, 2010).

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk adalah salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper yang mempekerjakan secara langsung sekitar 17.200 karyawan. Indah Kiat menggunakan sumber daya alam yaitu kayu sebagai bahan baku utama dalam menjalankan proses bisnisnya sehingga perusahaan sangat rentan terhadap isu-isu lingkungan seperti penebangan liar yang dapat merusak citra perusahaan. Indah Kiat memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip usaha berkelanjutan (*sustainability*) disetiap kegiatan operasionalnya dan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan guna mewujudkan *Good Corporate Governance* serta sebagai salah satu strategi perusahaan dalam menepis isu-isu lingkungan yang sering ditujukan kepada Indah Kiat.

Seluruh kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat diungkapkan dan dilaporkan melalui *annual report* dan *sustainability report* bersama dengan APP sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative*. PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk merupakan anak perusahaan Asia Pulp and Paper yang menggunakan ISO 26000 sebagai panduan dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Indah Kiat juga menjadi contoh bagi anak perusahaan Asia Pulp and Paper lainnya seperti PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk., PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry, PT. The Univenus, PT. Ekamas Fortuna, dan PT. Purinusa Ekapersada dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan

pedoman ISO 26000 dan melaporkan implementasi ISO 26000 sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dilakukan penelitian mengenai implementasi ISO 26000 serta pelaporan dan pengungkapan kegiatan CSR sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative (GRI)* oleh PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

1.2 Perumusan Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik sesuai dengan ISO 26000 memadukan empat prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* secara harmonis. Salah satu cara untuk menerapkan ISO 26000 adalah dengan melaporkan kinerja CSR sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative (GRI)*. Implementasi dan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan *stakeholder*.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ISO 26000 pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk?
2. Bagaimana pelaporan dan pengungkapan implementasi ISO 26000 sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan ISO 26000 pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.
2. Mengetahui pelaporan serta pengungkapan implementasi ISO 26000 sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi perusahaan

Sebagai pengetahuan bagi perusahaan mengenai implementasi dan pelaporan serta pengungkapan ISO 26000 dengan menggunakan standar *Global Reporting Initiative*.

2. Bagi akademis

Sebagai pengetahuan mengenai implementasi dan pelaporan serta pengungkapan ISO 26000 dengan menggunakan standar *Global Reporting Initiative* pa.

3. Bagi anak perusahaan Asia Pulp and Paper lainnya

Mengetahui implementasi ISO 26000 pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dan pelaporan serta pengungkapan ISO 26000 sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative*.

1.5 Metode Penelitian

Desain dalam penelitian ini adalah studi kasus pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dengan melakukan wawancara dan studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk yaitu dengan anggota tim CSR Indah Kiat pada divisi *General Affair* dan juga dengan salah satu anggota tim CSR Asia Pulp and Paper untuk mengetahui kebijakan APP yang digunakan sebagai salah satu dasar kegiatan CSR pada Indah Kiat.
- b. Data Sekunder yang diperoleh dengan mencari teori-teori dan ide-ide pokok pikiran dari buku, literatur, artikel, dan jurnal yang terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini diuraikan dalam lima bab, mengenai isi bab-bab tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang dipakai sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.

Bab 3 : Profil Perusahaan

Pada bab ini dibahas mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, kegiatan usaha perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, dan laporan *sustainability* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Bab 4 : Analisis dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai topik tesis, yaitu implementasi ISO 26000 pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dan pelaporan serta pengungkapan sesuai dengan standar GRI.

Bab 5 : Kesimpulan, Batasan Penelitian dan Saran

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan ada konflik kepentingan antara manajer (agen) dan principal (pemilik). Pemilik ingin mengetahui semua informasi di perusahaan termasuk aktifitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi/dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja manajer (Hendriksen & Van Breda, 2000).

Eishenhardt (1989) memakai asumsi tiga sifat dasar manusia yaitu:

- a. manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*);
- b. manusia memiliki persepsi terbatas mengenai masa mendatang (*bounded rationality*), dan
- c. manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Dalam menjalankan tugasnya, manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemilik perusahaan (prinsipal) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemisahan ini mengakibatkan setiap risiko yang ditanggung oleh perusahaan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham karena manajer sebagai pengelola tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan untung maupun rugi perusahaan. Akibatnya, manajer akan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham.

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*asimmetryc information*). Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai

kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (Hendriksen & Van Breda, 2000).

Asimetri informasi antara manajemen (agen) dengan pemilik atau pemegang saham (prinsipal) dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga dapat merugikan para pemegang saham. Dengan perkembangan akhir-akhir ini banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan yaitu *stakeholder* sehingga informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan tidak lagi hanya kepada pemilik tetapi juga kepada *stakeholder*.

2.1.1 Corporate Governance (CG)

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal dengan "*Cadbury Report*". Laporan ini dipandang sebagai titik tolak (*turning point*) yang sangat menentukan praktik CG diseluruh dunia. *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Tjager *et al.*, 2003).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate governance terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Arti lain dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok,

asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat lain (Djarmiko, 2001).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Dalam mengimplementasikan GCG, perusahaan harus memenuhi lima asas yang terdapat dalam GCG. Asas-asas GCG menurut KNKG (2006) yaitu:

a. *Transparency*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Dalam menjalankan asas ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya.

b. *Accountability*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan serta tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibility*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independency*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Fairness*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) dan

pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam Gond dan Moon (2011) istilah awal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) pertama kali dicetuskan oleh Howard R. Bowen (1963) menuliskan definisi CSR yaitu “...its refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”. Keith Davis (1960) dalam literturnya mendefinisikan CSR sebagai “businessmen’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest”. McGuire (1963) dalam Gond dan Moon (2011) menyatakan “The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations”. Kata *beyond* dijelaskan lebih lanjut oleh McGuire bahwa suatu korporasi haruslah juga memperhatikan permasalahan politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kepentingan karyawan dan juga seluruh permasalahan sosial masyarakat lainnya.

Pada tahun 1971 *Committee for Economic Development* (CED) menerbitkan *Social Responsibilities of Business Corporation* dimana CSR digambarkan menjadi tiga lingkaran konsentrasi. Lingkaran dalam merupakan lingkaran dasar fungsi ekonomi yang kemudian lingkaran tengah menggambarkan bahwa fungsi ekonomi harus dijalankan secara sensitif terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas sosial. Sedangkan lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang baru muncul seiring dengan meningkatnya peran serta perusahaan secara aktif dalam menjaga lingkungan sosial (*Sejarah CSR*, n.d).

Lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF (yang dalam Bahasa Inggris berarti tuli) di dunia industri. DEAF adalah akronim dari Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2008).

a. Dehumanisasi industri

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah

menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “Merger mania” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang PHK dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

b. Emansipasi hak-hak publik

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

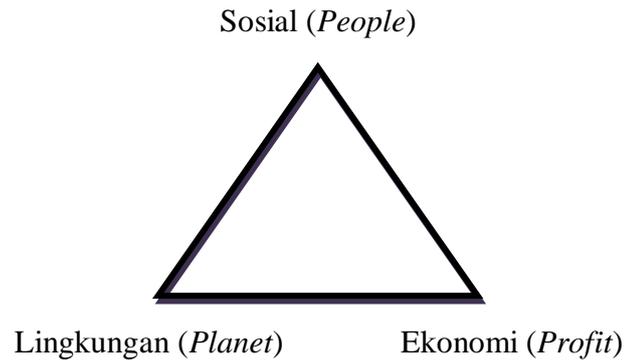
c. Aquariumisasi dunia industri

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.

d. Feminisasi dunia kerja

Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (*child care*) atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini.

Piramida CSR yang dikembangkan oleh Elkington dalam Susanto (2007) menggambarkan CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines*.



Gambar 2.1 *Triple Bottom Lines*

(Sumber: Wibisono, 2007, hal.32)

a. *Profit* (keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran jika fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar *profit* atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan perusahaan yang digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktifitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai yang semaksimal mungkin.

Peningkatan produktifitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu dan proses pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

b. *People* (masyarakat)

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat dan lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan

Universitas Indonesia

manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada warga sekitar. Karenanya pula perusahaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan diterima, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

Dalam hal ini, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bersifat syarat perlu (*necessary condition*), yang didasarkan atas pilihan sendiri, bukan karena “dipaksa” aturan atau “tekanan” masyarakat dan datang dari niat baik yang tulus. Dalam konteks ini ada “nuansa kenabian”, nuansa berempati dan berbagi dengan masyarakat.

Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial ini perusahaan memang perlu mempunyai pandangan bahwa CSR adalah investasi masa depan. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost center*), melainkan sentra laba (*profit center*) di masa mendatang. Karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan.

c. *Planet* (lingkungan)

Unsur ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Semua kegiatan yang kita dilakukan mulai bangun di pagi hari hingga terlelap di malam hari berhubungan dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat bagi kita. Sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya.

Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang wajar. Maka kita banyak melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh

keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.

Sebaliknya, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan kerap harus dibayar dengan harga yang mahal dengan timbulnya bermacam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam lainnya.

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Disinilah, perlunya penerapan konsep *triple bottom line* atau 3BL, yakni *profit*, *people* dan *planet*. Dengan kata lain, “jantung hati” bisnis bukan hanya *profit* (laba) saja, tetapi juga *people* (manusia) dan *planet* (lingkungan).

Menurut Harris dan Klepper (1976) dalam Moir (2001), alasan-alasan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitas *corporate social responsibility* adalah:

- a. *Corporate citizenship*, menjalankan peran perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.
- b. Melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan, dimana dengan lingkungan yang baik, perusahaan akan dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik.
- c. Memberikan penghargaan kepada karyawan sehingga perusahaan akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti loyalitas karyawan.
- d. *Public relations*, mewujudkan nilai-nilai hubungan dengan masyarakat.
- e. *Pluralisme*, memberikan jaminan agar masyarakat luas tetap dapat memberikan pilihan atas usaha pemerintah dan sektor swasta.
- f. Komitmen dari manajer dan staf senior untuk ikut terlibat dalam masalah-masalah dalam masyarakat.

2.2.2 Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Murray dan Vogel (1997) dalam literturnya mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) “*Pro-social corporate endeavors or corporate social performance has traditionally been conceptualized rather broadly as the managerial obligation to take action to protect and improve both the welfare of society as the whole and the interest of organizations*”.

Definisi CSR menurut Holme dan Watts (2000) adalah *“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life to the workforce and their families as well as of the local community and society at large”*.

The World Bank mendefinisikan CSR *“the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for development”*. Sedangkan *European Union (EU)* sebagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap CSR mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep, yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkannya pada semua *stakeholder* terkait (*Sekilas CSR*, n.d).

Michael Hopkins (2004) mendefinisikan CSR:

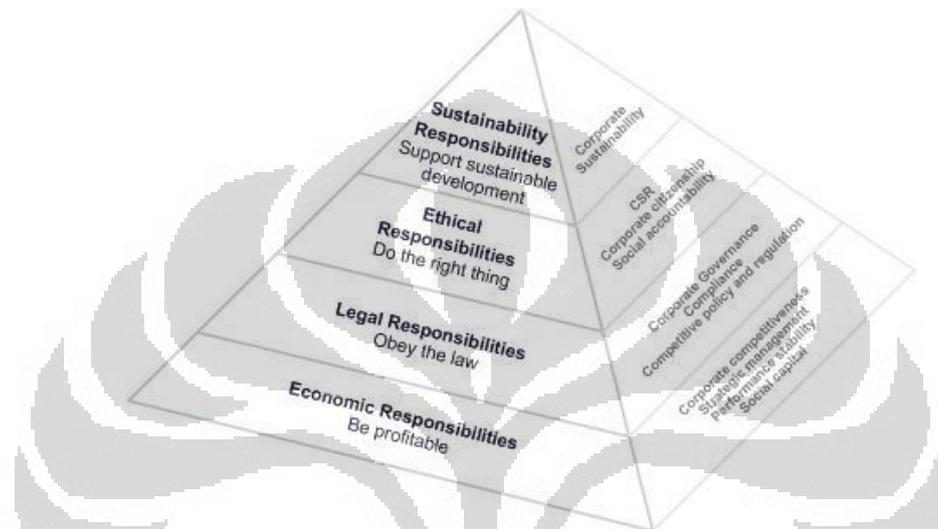
“...is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. Ethically or responsible’ means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies social includes economic responsibility. Stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for peoples both within and outside the corporation”.

CSR Indonesia mendefinisikan CSR sebagai upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Jalal, 2007, hal.9).

Jika diteliti dengan seksama, terdapat perbedaan fokus antara definisi yang dikembangkan oleh para akademisi dan kalangan bisnis. Para akademisi cenderung untuk mendefinisikan CSR berdasarkan tipe dan karakteristik tertentu. Sementara kalangan bisnis cenderung untuk mendefinisikan CSR dan terminologi operasional (Hartanti, 2006).

2.2.3 Jenis-jenis *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Archie Carrol dalam Henningfield, Pohl dan Tolhurst (2006) pembagian jenis CSR terangkum dalam “*Four-Part Model of Corporate Social Responsibility*” yang tergambarakan dalam sebuah piramida.



Gambar 2.2 *Carroll's Pyramid*

(Sumber: <http://www.csrquest.net>, diakses 7 Mei 2012)

CSR digambarkan menjadi sebuah piramida yang memiliki empat lapisan yaitu:

a. Tanggung jawab ekonomis

Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

b. Tanggung jawab legal

Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah

c. Tanggung jawab etis

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil, dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.

Universitas Indonesia

d. Tanggung jawab filantropis

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*.

Kotler dan Lee (2005) menyebutkan beberapa bentuk program CSR yang dapat dipilih, yaitu:

a. *Cause Promotions*

Dalam *cause promotions* perusahaan berusaha untuk meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana isu ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Perusahaan bisa melaksanakan programnya sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya saja melakukan kerjasama dengan *non government organization*.

b. *Cause-Related Marketing*

Ketika sebuah perusahaan menyatakan bahwa sebagian dari keuntungan atau penjualan produknya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial tertentu, maka perusahaan tersebut sedang melakukan apa yang disebut sebagai *cause related marketing* (CRM). Pada aktivitas CSR ini perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk.

Dalam *cause related marketing*, perusahaan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. Untuk konteks Indonesia, pelaksanaan *cause related marketing* terutama

ditujukan untuk kegiatan beasiswa, penyediaan air bersih, pemberian layanan kesehatan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

Contoh penerapan CRM di Indonesia diantaranya sabun Lifebuoy pernah meluncurkan kampanye “Berbagi Sehat” yang mendonasikan sebagian hasil penjualan untuk membangun fasilitas MCK di seluruh Indonesia. Aqua membuat program “1 untuk 10”, yang berjanji akan menyediakan air bersih untuk desa-desa yang mengalami masalah ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara. Setiap satu liter Aqua produk tertentu yang terjual, Aqua berjanji akan menyediakan sepuluh liter air bersih untuk masyarakat target. Dalam waktu sekitar tiga bulan saja, jumlah air bersih yang akan disediakan Aqua mencapai lebih dari satu milyar liter. Es krim Viennetta dari Wall’s meluncurkan “Berbagi 1000 Kebajikan” yang menyumbangkan Rp.1000,00 setiap penjualan es krimnya untuk anak-anak korban gempa Sumatera dan dukungan pendidikan untuk anak-anak berprestasi dari kalangan yang tidak mampu (Cahyowati, 2010).

Agar CRM berhasil, Kotler dan Lee (2005) menyarankan agar perusahaan memilih isu sosial yang memang menjadi perhatian perusahaan maupun konsumen yang menjadi target produknya; memilih mitra yang memang telah memiliki jaringan luas dan terkenal berkinerja baik; memilih produk yang asosiasinya dengan isu yang akan ditangani sudah atau berpotensi menjadi kuat; melakukan riset dengan hati-hati terhadap konsumen yang menjadi target, untuk kemudian menyusun strategi pemasaran yang sesuai; memastikan bahwa aktivitas ini “terlihat” melalui pencantuman yang jelas di produk, iklan yang memadai, dan sebagainya; memastikan bahwa tawaran CRMnya sederhana dan mudah dimengerti, untuk mencegah kecurigaan calon konsumen; dan yang terakhir adalah bersedia untuk mengakui kesalahan bila memang terjadi dan melakukan perbaikan atas kesalahan itu.

c. *Corporate Social Marketing*

Pada aktivitas CSR ini perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan

kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioral changes*) dalam suatu isu tertentu. Biasanya *corporate social marketing* fokus pada isu bidang kesehatan (*health issues*) misalnya mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, bidang keselamatan (*injury prevention issues*) misalnya keselamatan berkendara, bidang lingkungan hidup (*environmental issues*) misalnya konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida, bidang masyarakat (*community involvement issues*) misalnya memberikan suara dalam pemilu atau program menyumbangkan darah (Cahyowati, 2010).

d. *Corporate Philanthropy*

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk CSR yang paling tua. *Corporate philanthropy* dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. Pada aktivitas CSR ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma.

Corporate philanthropy dapat dilakukan dengan menyumbangkan uang secara langsung misalnya dengan memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu, memberikan barang/produk misalnya dengan memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak di sekitar lingkungan perusahaan, memberikan jasa misalnya dengan memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil, memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan misalnya saja sebuah hotel menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi *showroom* bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat (Cahyowati, 2010).

e. *Corporate Volunteering*

Community volunteering adalah bentuk CSR dimana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program CSR

yang sedang dijalankan oleh perusahaan dengan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Pada aktivitas CSR ini perusahaan mendukung dan mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

Beberapa bentuk kegiatan *community volunteering*, yaitu memasyarakatkan etika perusahaan melalui komunikasi korporat yang akan mendorong karyawan untuk menjadi sukarelawan bagi komunitas, menyarankan kegiatan sosial atau aktivitas amal tertentu yang bisa diikuti oleh para karyawan, membantu para karyawan menemukan kegiatan sosial yang akan dilaksanakan melalui *survey* ke wilayah yang diperkirakan membutuhkan bantuan sukarelawan, mencari informasi melalui *website* atau dalam beberapa kasus dengan menggunakan *software* khusus yang akan melacak aktivitas sosial yang cocok dengan minat karyawan yang akan menjadi tenaga sukarelawan, menyediakan waktu cuti dengan tanggungan perusahaan bagi karyawan yang bersedia menjadi tenaga relawan, memberikan penghargaan dalam bentuk uang untuk jumlah jam yang digunakan karyawan tersebut sebagai sukarelawan, memberikan penghormatan kepada para karyawan yang terlibat dalam kegiatan sukarela seperti memberikan penghargaan berupa penyematan pin maupun pemberian plakat (Cahyowati, 2010).

f. *Socially Responsible Bussiness*

Dalam *socially responsible bussiness* perusahaan melakukan perubahan terhadap salah satu atau keseluruhan sistem kerjanya agar dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada aktivitas CSR ini perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup di dalamnya

aspek-aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional.

Socially responsible business dapat dilakukan dengan membuat fasilitas yang memenuhi bahkan melebihi tingkat keamanan lingkungan dan keselamatan yang ditetapkan, mengembangkan perbaikan proses produksi barang dan jasa seperti berbagai kegiatan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam proses peningkatan pertumbuhan tanaman pangan, menghentikan penawaran produk yang ditenggarai membahayakan kesehatan manusia meskipun produk itu legal, memilih pemasok berdasarkan kriteria kesediaan mereka menerapkan dan memelihara aktivitas *sustainable development*, memilih perusahaan manufaktur dan bahan kemasan yang paling ramah lingkungan dengan berbagai kriteria, melakukan pelaporan secara terbuka mengenai material produk yang digunakan berikut asal-usulnya, potensi bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan produk serta berbagai informasi lain yang berguna bagi konsumen, mengembangkan berbagai program untuk menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat, membuat batasan umur dalam melakukan penjualan, misalnya barang-barang tertentu tidak akan dijual kepada anak yang belum berumur 18 tahun (Cahyawati, 2010).

Salah satu yang menonjol dari praktik CSR di Indonesia adalah penekanan pada aspek *community development*, karena paling sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran (Ambadar, 2008).

Bentuk dari *community development* terdiri dari *community relation* atau pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait, seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya, *community service* merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum, antara lain pembangunan/peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, dan *community empowerment* adalah program-program berkaitan dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program ini

adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat (Budimanta *et al.*, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Business Links* dalam Wismiarti (2006), implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatannya sebagai:

- a. Program donor/sumbangan (*charity program*), meliputi berbagai kegiatan relasi publik untuk membantu masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
- b. Program lestari (*sustainable program*), meliputi berbagai program yang bersifat lebih jangka panjang dan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dengan memberikan pengarahan dan fasilitas.
- c. Program pemberdayaan (*empowerment program*).
- d. Program kemitraan (*partnership program*), yaitu program yang melibatkan perusahaan, masyarakat dan juga pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebelum pelaksanaan program-program ini, perusahaan biasanya membina hubungan dengan masyarakat lokal untuk mengumpulkan berbagai kebutuhan mereka dengan metode partisipatif, sehingga dapat dibuat program-program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia terdapat juga jenis CSR yang disebut dengan PKBL. PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dimana PKBL adalah istilah CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia. Dasar hukum PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Isu-isu PKBL meliputi program Kemitraan yang mayoritas dengan UMKM dan Program Bina Lingkungan yang terbagi atas bantuan bencana alam, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan masyarakat, keagamaan, pengembangan sarana umum, dan pelestarian alam (Suprpto, 2006).

2.2.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut penggolongannya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan (*Corporate social responsibility*, 2008):

a. *Brand differentiation*

Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan loyalitas konsumen (*customer loyalty*).

b. *Human resources*

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat wawancara, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi karyawan lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.

c. *License to operate.*

Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “ijin” atau “restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

d. *Risk management*

Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya “*doing the right thing*” berguna bagi perusahaan dalam mengelola risiko-risiko bisnis.

Keuntungan perusahaan yang menerapkan CSR menurut Wibisono (2007) adalah:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi *brand image* perusahaan

Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan *image* positif perusahaan. Inilah yang menjadi nilai lebih bagi perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkelanjutan.

2. Layak mendapatkan *social licence to operate*
Masyarakat sangat berpengaruh pada keberlanjutan. Ketika masyarakat sudah mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga setidaknya imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah dengan memberikan keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya.
3. Mereduksi risiko perusahaan
CSR merupakan langkah preventif dan antisipatif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko bisnis perusahaan karena merupakan upaya investasi. Mengelola risiko ditengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya suatu usaha. Disharmoni dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program CSR. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholder* perlu mendapat perhatian.
4. Meleburkan akses sumber daya
Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk mempermudah mendapatkan sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju pasar
Adanya program CSR yang dilakukan, dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan menuju peluang pasar. Termasuk di dalamnya akan menumpuk loyalitas konsumen menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi biaya
Dengan melaksanakan program CSR, maka secara tidak langsung perusahaan akan melakukan penghematan biaya, karena program ini merupakan investasi jangka panjang. Misalnya dengan melakukan daur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*
Dengan implementasi program CSR, hubungan yang baik dengan *stakeholder*

akan bertambah baik karena dapat menambah intensitas komunikasi.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang menerapkan CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata *stakeholder* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja karyawan.

10. Peluang mendapatkan penghargaan perusahaan yang melakukan program CSR lebih tinggi.

Banyaknya penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada pelaku CSR sekarang akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

Selain bagi perusahaan, CSR juga memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Manfaat CSR bagi masyarakat menurut Brew (2008) adalah aktivitas dan peluang ekonomi, penyerapan tenaga kerja, akses terhadap *skill* dan teknologi, infrastruktur yang meningkat, perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan, dan investasi sosial.

2.3 Pedoman Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam menjalankan aktivitas CSR, tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi unik yang berpengaruh terhadap bagaimana memandang tanggung jawab sosial. Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko. Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja (*frame work*) yang luas dalam pengimplementasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen lingkungan (Susanto, 2007).

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggung jawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu *Rio Earth Summit on the Environment* tahun 1992 dan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* pada tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan (International Organization for Standardization, 2010).

ISO 26000 merupakan salah satu pedoman yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan CSR dan bukanlah merupakan suatu sertifikasi. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktifitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif, dan memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Dalam Jalal (2010), CSR menurut ISO 26000 didefinisikan sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat, pertimbangan harapan *stakeholder*, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku, dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Dari definisi CSR tersebut prinsip-prinsip yang terkandung pada ISO 26000 dalam Jalal (2010) adalah:

a. Akuntabilitas

Membuktikan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah melakukan segala sesuatu dengan benar terkait dampak terhadap masyarakat dan lingkungan atas seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Transparansi

Perusahaan menyatakan secara transparan seluruh keputusan dan aktivitas yang memiliki dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk itu perusahaan dituntut atas keterbukaan yang *clear, accurate, dan completeness* atas seluruh kebijakan, keputusan, dan aktivitas yang dilakukan.

c. Perilaku etis

Perusahaan harus berperilaku etis sepanjang waktu dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan, dan integritas. Perilaku etis dilaksanakan melalui pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan terus meningkatkan standar perilaku etis.

d. Penghormatan pada kepentingan *stakeholder*

Perusahaan harus menghormati dan menanggapi seluruh kepentingan para *stakeholder*. Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan keberlanjutan.

e. Kepatuhan terhadap hukum

Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum merupakan suatu kewajiban, untuk itu yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh kepada seluruh aturan yang dibuat oleh perusahaan sendiri secara adil dan imparial, mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, serta secara periodik memeriksa kepatuhannya.

f. Penghormatan terhadap norma perilaku internasional

Di negara-negara dimana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak

mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, perusahaan harus berusaha mengacu kepada norma perilaku internasional.

g. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

Perusahaan harus menghormati serta mengakui pentingnya hak asasi manusia dan sifatnya yang universal. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah ketika ditemui situasi pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus melindungi hak asasi manusia tersebut dan tidak mengambil kesempatan dari situasi tersebut, dan apabila tidak ada regulasi hak asasi manusia di tingkat nasional, maka perusahaan harus mengacu pada standar internasional.

Ketujuh prinsip-prinsip di atas kemudian diintegrasikan dalam tujuh subjek inti yang menjadi pedoman dalam melaksanakan CSR. Ketujuh subjek inti tersebut adalah:

1. Tata Kelola Organisasi

Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem, dan struktur yang memungkinkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan praktik *social responsibility*.

“Governance systems may vary, depending on the size and type of organization and the economic, political, cultural and social contexts in which it operates. Although governance processes and structures take many different forms, both formal and informal, all organizations make and implement decisions within a governance system. The governance system within an organization is directed by the person or group of persons having the authority and responsibility for pursuing the organization’s objectives” (Organizational for Standardization, 2010).

Sistem tata kelola dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan ukuran organisasi serta konteks ekonomi, politik, budaya dan sosial dimana mereka beroperasi. Meskipun berbagai proses dan struktur tata kelola memiliki bentuk yang berbeda-beda, baik formal dan informal, semua organisasi membuat dan mengimplementasikan keputusan dalam sebuah sistem tata kelola. Sistem tata kelola dalam organisasi diarahkan oleh orang atau sekelompok orang yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengejar tujuan organisasi. Akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan *stakeholder*, dan kepatuhan hukum harus dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan (Jalal, 2010).

2. Hak Asasi Manusia

“While the state has the primary obligation to protect, promote and uphold human rights, the Universal Declaration of Human Rights calls on every individual and every organ of society to play its part in securing the observance of the rights set forth in the Declaration. Hence an organization has a responsibility to safeguard human rights in its operations, as well as in its wider sphere of influence” (Organizational for Standardization, 2010).

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan kegiatan operasinya serta dalam lingkup pengaruh yang lebih luas. Hak asasi manusia dalam ISO 26000 bersifat dimiliki dan melekat pada semua orang (*inherent*), tidak ada pihak manapun baik itu pemerintah atau pihak lain yang dapat mencabut atau menghilangkan (*inaliable*), berlaku untuk semua orang dan semua kalangan (*universal*), tidak ada satu hak pun yang dapat diabaikan (*indivisible*), pemenuhan hak tertentu terkait dengan pemenuhan hak lainnya (*interdependent*) (Jalal, 2010).

3. Praktik Ketenagakerjaan

“The labour practices of an organization can have great impact on society and thereby can contribute significantly to sustainable development. The creation of jobs, as well as wages and other compensation paid for work performed are among an organization's most important economic impacts. Meaningful and productive work is an essential element in human development” (Organizational for Standardization, 2010).

Praktik ketenagakerjaan meliputi seluruh kebijakan dan implementasi di dalam, oleh, dan atas nama perusahaan. Praktik ketenagakerjaan termasuk tanggung jawab untuk pekerjaan yang sebagian dilakukan oleh pihak lain, diantaranya adalah sub-kontraktor. Pemegang tanggung jawab utama dalam masalah ketenagakerjaan adalah pemerintah. Jika pemerintah gagal membuat

legislasi yang memadai, perusahaan harus mengacu pada instrument internasional dan jika hukum nasional ada walau penegakannya belum memadai, perusahaan tetap harus mengacu pada hukum nasional (Jalal, 2010).

4. Lingkungan

“Addressing environmental issues is not only a precondition for the survival and prosperity of our generation; it is a responsibility our generation should fulfill so as to enable future generations to enjoy a sustainable global environment. An organization should be mindful that environmental responsibility is a part of the social responsibility of any organization” (Organizational for Standardization, 2010).

Perusahaan harus menyadari bahwa tanggung jawab lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan diharapkan ramah lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan karena isu lingkungan tidak hanya merupakan prasyarat untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi generasi kita tetapi juga merupakan tanggung jawab generasi kita untuk menjaganya sehingga memungkinkan untuk generasi mendatang untuk menikmati lingkungan global yang berkelanjutan (Jalal, 2010).

5. Praktik Operasi yang Adil

“Fair operating practices improve the environment in which organization’s function by: encouraging fair competition, improving the reliability and fairness of commercial transactions, preventing corruption and promoting fair political processes. Organizations should use their relative strength and position in their relationship with other organizations to promote positive outcomes” (Organizational for Standardization, 2010).

Praktik operasi yang adil menunjukkan pada etika perusahaan dalam berhubungan dengan organisasi lainnya. Ketaatan, promosi, dan dorongan dari berbagai standar perilaku etis mendasari keseluruhan praktik operasi yang adil (Jalal, 2010).

6. Konsumen

“Consumers are among an organization's important stakeholders. An

organization's operations and output have a strong impact on those who use its goods or services, especially when they are individual consumers. Consumers are referees in the competitive marketplace, and their preferences and decisions have a strong influence on the success of most organizations” (Organizational for Standardization, 2010).

Dalam berhadapan dengan konsumen, perusahaan haruslah bersikap jujur dalam menjalankan bisnis, melakukan pemasaran, dan menjamin kualitas serta ketersediaan atas produk dan jasa yang dihasilkan. Delapan hak konsumen adalah pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan, informasi, memilih, didengarkan, penyelesaian klaim, edukasi, dan lingkungan yang sehat (Jalal, 2010).

7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

“The need for contributions to social and economic development in order to reduce poverty and improve poor social conditions is universally accepted. The critical need to address issues of social and economic development is reflected in the United Nations Millennium Declaration” (Organizational for Standardization, 2010).

Perusahaan diharapkan dapat menempatkan diri sebagai bagian dari dan tidak terpisah dari komunitas. Untuk itu perusahaan harus mengakui dan menghormati hak masyarakat untuk menentukan tujuan dan bentuk penggunaan sumber daya serta menghormati karakteristik masyarakat, menghormati kemitraan dan pertukaran pengalaman dan sumber daya (Jalal, 2010).

2.4 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pada dasarnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Definisi sederhana dari pemangku kepentingan diungkapkan oleh Freeman dalam Riyadi (2008) yaitu kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan atau kerugian dan yang hak-haknya dilanggar atau dihargai oleh tindakan korporasi. Yang termasuk pemangku kepentingan adalah para pemegang saham itu sendiri,

para kreditor, pekerja atau buruh, para pelanggan, pemasok, dan masyarakat atau komunitas pada umumnya.

Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan pemangku kepentingan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan (*Pemangku kepentingan*, 2011).

Sejak tahun 1963 sampai dengan 2003 terdapat setidaknya 75 definisi dari pemangku kepentingan. Namun dari keseluruhan definisi tersebut mengandung 2 prinsip yaitu:

1. *Principle of corporate legitimacy*

The corporation should be managed for the benefit of its stakeholders.

2. *The stakeholder fiduciary principle*

It must act in the interest of the stakeholders as their agent, and it must act in the interests of the corporation to ensure the survival of the firm, safeguarding the long-term stakes of each group (Jalal, 2011).

Menurut IFC dalam Jalal (2011) pemangku kepentingan didefinisikan sebagai “*persons or groups who are directly or indirectly affected by a project, as well as those who may have interests in a project and/or the ability to influence its outcome, either positively or negatively*”.

Dalam IFC (2007) juga dijelaskan bahwa yang juga termasuk di dalam pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah komunitas lokal yang terkena dampak representatif secara formal atau informal, pemerintah lokal atau pusat, politisi, pemimpin agama, organisasi masyarakat atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan, komunitas akademisi, atau lingkungan bisnis yang lain.

Sedangkan menurut ISO 26000 dalam Jalal (2010) yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) didefinisikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban hukum?
- b. Siapa yang terpengaruh secara negatif maupun positif oleh keputusan dan aktivitas perusahaan?
- c. Siapa yang menyuarakan pernyataan mengenai keputusan dan aktivitas perusahaan?
- d. Siapa yang biasanya terlibat dalam penyelesaian isu-isu penting?

- e. Siapa yang bisa membantu perusahaan dalam mengelola dampak tertentu?
- f. Siapa yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR-nya?
- g. Siapa yang akan dirugikan kalau tidak dilibatkan?
- h. Siapa yang terpengaruh sepanjang *value chain*?

Menurut Handy dalam Radyati (2008), kini tujuan keberadaan bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga melakukan sesuatu yang lebih baik dengan tujuan tidak hanya memaksimalkan nilai pemegang saham, akan tetapi juga memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* perusahaan ada yang di dalam perusahaan (*internal stakeholder*), dan ada yang berada di luar perusahaan (*external stakeholder*). *Internal stakeholders* terdiri dari para karyawan dan seluruh anggota perusahaan, termasuk pemegang saham. *External stakeholders* terdiri dari pemasok, komunitas lokal, masyarakat luas, pesaing, pemerintah, kompetitor dan masyarakat dunia.

Bila hubungan dengan pemangku kepentingan tidak ditangani dengan baik oleh perusahaan, maka dapat berujung pada konflik. Prayogo (2008) menetapkan tiga *stakeholder* penting yang sering bermasalah dalam relasinya dengan korporasi, yaitu komunitas lokal, pekerja dan konsumen.

2.5 Pelaporan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pelaporan dan pengungkapan CSR berhubungan dengan teori agensi karena pelaporan dan pengungkapan CSR berhubungan dengan perilaku perusahaan kepada *stakeholder*. Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate Sosial Reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan. Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, Oleh karena itu dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat (Rosmasita, 2007).

Menurut Futtera (2008) dalam Jalal (2012) alasan perusahaan melaporkan

kinerja keberlanjutannya adalah untuk menunjukkan akuntabilitas, menunjukkan peningkatan kinerja, membangun hubungan dengan *stakeholder*, menunjukkan manajemen keberlanjutan, dan menunjukkan kondisi kerja.

Prinsip pelaporan CSR menurut AA1000 *Assurance* dalam Jalal (2012) adalah:

a. *Materiality*

Laporan disajikan dengan mengungkapkan elemen-elemen yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasi perusahaan.

b. *Completeness*

Informasi yang disajikan lengkap dan akurat dimana penampilan organisasi di segala area dapat ditaksir dan dipahami.

c. *Responsiveness*

Organisasi merespon kepeduliannya dengan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dan ikut berpartisipasi untuk membangun perekonomian negara.

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholder* lainnya.

Menurut Sukada (2007), laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan berkaitan dengan kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya sebagai alat kontrol manajemen kepada pemangku kepentingan internal (*internal stakeholder*) maupun alat akuntabilitas (terutama) kepada pemangku kepentingan eksternal (*external stakeholder*). Laporan tersebut hanya dapat dikatakan *sustainable* manakala kinerja yang dilaporkannya dalam kurun waktu tertentu sudah berkelanjutan atau menunjukkan kecenderungan membaik.

Menurut Witoelar (2005) ada beberapa manfaat diperoleh perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*, antara lain:

a. Meningkatkan citra perusahaan

Pembangunan citra merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kepedulian perusahaan

kepada lingkungan dan sosial masyarakat. Dengan menerbitkan *sustainability report*, masyarakat dapat mengetahui bahwa perusahaan telah melaksanakan komitmennya kepada lingkungan dan masyarakat.

b. Disukai konsumen

Hasil survei di Inggris menyatakan bahwa 60% konsumen akan membeli produk yang dipersepsikan sedikit merusak lingkungan (ramah lingkungan). Begitu pula sebaliknya, konsumen tidak akan membeli produk yang dipersepsikan dapat merusak lingkungan.

c. Diminati oleh investor

Investor tidak hanya berfokus untuk mencari *return* yang besar tetapi juga mencari perusahaan yang ramah lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sosial

d. Dipahami oleh *stakeholder*

Dalam pembuatan *sustainability report*, perusahaan harus memahami *stakeholder* dengan membangun komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, perusahaan perlu mengidentifikasi sifat dan kebutuhan *stakeholder*. Dialog antara perusahaan dengan *stakeholder* akan membantu perusahaan dalam mengantisipasi berbagai isu yang mungkin terjadi, memenuhi kebutuhan *stakeholder*, dan membangun bisnis yang lebih baik.

Saat ini *sustainability report* perusahaan-perusahaan hampir di seluruh dunia disusun dengan menggunakan standar pelaporan yang diusulkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). *Global Reporting Initiative Guideline* merupakan *guideline* yang paling banyak dijadikan rujukan dalam *CSR Reporting*. GRI dibentuk tahun 1997 oleh *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan *United Nation Environment Programme* (UNEP).

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola. GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan di dunia dalam rangka mendorong transparansi yang lebih besar (*Global Reporting Initiative*, 2010).

GRI dalam standar pelaporannya memperhatikan tiga indikator/aspek, yaitu indikator ekonomi atau keuangan (*economic performance indicators*),

indikator lingkungan (*environment performance indicator*), dan indikator sosial (*social performance indicators*). Indikator sosial terdiri dari empat indikator, yaitu hak asasi manusia (*human rights performance indicators*), masyarakat (*society performance indicators*), tenaga kerja (*labor performance indicators*), dan pertanggungjawaban produk (*product responsibility performance indicators*) (Global Reporting Initiative, 2006).

Prinsip-prinsip laporan untuk menetapkan kualitas menurut pedoman keberlanjutan GRI (2006) adalah:

- a. *Balance*
Mencerminkan aspek-aspek yang positif maupun negatif.
- b. *Comparability*
Isu dan informasi dipilih dan dilaporkan dengan konsisten hingga dapat dibandingkan antar waktu.
- c. *Accuracy*
Informasi harus cukup detail agar bisa dinilai oleh *stakeholder*.
- d. *Timeliness*
Dilaporkan secara reguler, tersedia tepat waktu kepada *stakeholder*.
- e. *Clarity*
Informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh *stakeholder*.
- f. *Reliability*
Informasi harus dikumpulkan, direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan materialitas.

Sedangkan, prinsip pelaporan untuk menetapkan isi laporan dalam GRI (2006) adalah:

- a. *Materialitas*
Informasi yang dilaporkan dapat mempengaruhi penilaian dan kebijakan dari *stakeholder* secara substantif.
- b. *Pelibatan stakeholder*
Mengidentifikasi para *stakeholder* dan menjelaskan dalam laporan bagaimana organisasi telah merespon harapan dan kepentingan tersebut.

- c. Konteks keberlanjutan
Memperlihatkan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.
- d. Kelengkapan
Cakupan topik dan indikator material serta definisi batasan laporan harus dapat menggambarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan memungkinkan *stakeholder* untuk menilai kinerja organisasi dalam periode laporan berjalan.
Menurut GRI (2006), isi *Sustainability Report* terdiri dari 5 bagian:
 - a. Visi dan strategi
Menjelaskan visi dan strategi perusahaan berkaitan dengan *sustainability*, dicantumkan juga pernyataan atau sambutan dari manajemen.
 - b. Profil perusahaan
Merupakan *overview* struktur organisasi operasi perusahaan serta ruang lingkup pelaporan.
 - c. Sistem manajemen dan struktur penegelolaan
Pengungkapan struktur organisasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan sistem manajemen, termasuk usaha-usaha perusahaan dalam melibatkan *stakeholder*.
 - d. GRI *content index*
Berisi tabel yang mengidentifikasi letak setiap elemen isi laporan GRI berdasarkan bagian dan indikatornya. Tujuannya untuk memudahkan pengguna laporan agar dapat mengakses secara cepat informasi dan indikator yang terdapat dalam GRI.
 - e. Indikator kinerja
Indikator ini mengukur efek atau dampak kegiatan perusahaan meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.6 Menerapkan Panduan GRI Bersama Dengan ISO 26000

GRI sejak awal secara aktif turut serta, lewat berbagai pemangku kepentingan internasional, dalam proses pengembangan ISO 26000. GRI mendukung upaya yang diberikan lewat panduan GRI bersama dengan ISO 26000

sebagai kontribusi positif yang dapat dicapai dunia bisnis dan organisasi lain melalui perbaikan cara beroperasinya, guna menjamin masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Sebagai salah satu kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan, disusun berdasarkan pendekatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan internasional proses yang didasarkan konsensus, GRI memberikan panduan yang paling sesuai untuk mendukung organisasi yang tertarik melaporkan aspek-aspek yang dicakup dalam ISO 26000 (Global Reporting Initiative, 2010).

Panduan ISO 26000 menekankan pentingnya pelaporan publik untuk kinerja tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal, seperti karyawan, masyarakat setempat, investor dan regulator. Penekanan ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian internasional terhadap masalah pelaporan, dan ini sejajar dengan misi GRI untuk menjadikan pengungkapan kinerja di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi satu praktik umum (Global Reporting Initiative, 2010).

Walau ISO 26000 tidak memberikan petunjuk tentang pelaporan kinerja tanggung jawab sosial, namun materi dari ISO 26000 juga membahas rangkaian topik yang mirip dengan yang ada dalam Panduan Pelaporan GRI. Untuk itu, bagi perusahaan panduan ISO menyediakan struktur dalam mengorganisir aktivitas mereka, yang dapat mempengaruhi proses pelaporan perusahaan. Dengan menggunakan kerangka kerja GRI ini bersama dengan panduan ISO yang baru, pelapor akan memiliki serangkaian alat bantu praktis untuk mengukur dan melaporkan kebijakan dan praktik tanggung jawab sosial mereka.

2.7 Strategi Corporate Social Responsibility (CSR)

Mengutip pernyataan dari Handerson (2001):

“When firms focus first on doing the right thing and on serving all the stakeholders to whom they are responsible... they can not only transform the economic performance... but also play a central role in healing the social and environmental systems on which we all depend” (Jalal, 2011).

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis memiliki arahan dalam mengatur hubungan seluruh kepentingan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sehingga pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan khususnya sebagai bagian dari manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam strategi perusahaan. Citra baik perusahaan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat berubah menjadi buruk hanya dalam waktu sekejap.

Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Strategi CSR merupakan pendekatan yang mensinergikan CSR dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan mensinergikan adalah bahwa menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dengan menerapkan strategi CSR yang benar maka perusahaan dapat menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (*loyalitas*) atau citra perusahaan yang baik. Kedua hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang sulit ditiru oleh pesaing (Radyati, 2012).

BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

3.1.1 Sejaah Perusahaan

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk merupakan anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dengan nama CV. Berkat dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi pabrik di Tangerang, Provinsi Banten. Perusahaan ini mulai memproduksi kertas *woodfree* sejak tahun 1978. Pada tanggal 6 Juli 1983, nama Perusahaan diubah menjadi PT. Berkat Indah Agung. Pada tahun 1986, nama Perusahaan kembali diganti menjadi PT. Indah Kiat Pulp and Paper Corporation dan selanjutnya pada tahun 1996 menjadi PT. Indah Kiat Pulp and Paper Corporation, Tbk. Sejak tahun 1998, nama perusahaan berubah menjadi PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.

Pada tahun 1990, Indah Kiat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya sekarang bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia). Saat ini, perusahaan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Indah Kiat memproduksi bubur kertas (*pulp*), berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *containerboard* (*linerboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, dan kertas berwarna.

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, distributor, investasi, perdagangan, dan juga industri. Berikut ini daftar anak perusahaan dan proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh Indah Kiat:

Tabel 3.1 Daftar Anak Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

Nama Anak Perusahaan	Ruang Lingkup Usaha	Kepemilikan
Indah Kiat International Finance Company B.V	Jasa Keuangan	100%
Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Jasa Keuangan	100%
IK Trading Limited	Distributor	100%
Indah Kiat Finance (III) Mauritius Limited	Jasa Keuangan	100%
Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited	Jasa Keuangan	100%
IK Import & Export Limited	Distributor	100%
Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited	Jasa Keuangan	100%
Global Fibre Limited	Investasi	100%
Imperial Investment Limited	Jasa Keuangan	100%
Indah Kiat Finance B.V	Jasa Keuangan	100%
PT. Graha Kemasindo Indah	Perdagangan	99.50%
PT. Paramita Abadimas Cemerlang	Perdagangan	93.94%
PT. Paramita Gunakarya Cemerlang	Industri	99.93%

(Sumber: Laporan Tahunan PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk Tahun 2011)

Ruang lingkup usaha utama anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan adalah menerbitkan efek berbentuk pinjaman dan memperoleh pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan, ruang lingkup usaha utama anak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi terutama membantu pendistribusian produk perusahaan.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk adalah: “Menjadi produsen bubur kertas (*pulp*) dan kertas nomor satu di dunia dengan standar internasional pada abad ke-21 yang berdedikasi memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat”.

Misi PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk adalah:

- Meningkatkan pangsa pasar di dunia.
- Menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik.
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan.
- Mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional.

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Guna mewujudkan visi dari perusahaan, Indah Kiat berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Perusahaan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktik kerja terbaik melalui menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Indah Kiat adalah dengan lebih fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan kompetitif secara signifikan melalui kombinasi produk (*product mix strategy*), strategi kombinasi negara tujuan ekspor (*country mix strategy*), penetrasi terhadap pasar baru yang prospektif, meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui penerapan anggaran secara ketat, menjaga kesinambungan pasokan bahan baku serta melanjutkan upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

3.2 Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan publik, Indah Kiat menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Salah satu cara untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan *Audit Committee Charter* yang menjadi landasan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pengelolaan perusahaan dilaksanakan oleh Direksi di bawah bimbingan dan pengawasan Dewan Komisaris. Mereka bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan semua *stakeholders*, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Komisaris, Komisaris Independen dan Direksi menurut *Annual Report* PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Komisaris

Presiden Komisaris	: Teguh Ganda Wijaya
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris	: Indah Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris	: Arthur Tahya
Komisaris	: Frenky Loa
Komisaris Independen	: Mas Achmad Daniri
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn.) Soetedjo
Komisaris Independen	: DR. Ramelan, SH, MH

b. Direksi

Presiden Direktur	: Yudi Setiawan Lin
Wakil Presiden Direktur	: Linda Suryasari Wijaya Limantara
Wakil Presiden Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur	: Suresh Kilam
Direktur	: Didi Harsa
Direktur	: Hasanuddin The
Direktur	: Suhendra Wiriadinata
Direktur	: Baharudin
Direktur	: Kurniawan Yuwono
Direktur	: Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
Direktur/Sekretaris Perusahaan	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja

c. Komite Audit

Ketua	: Drs. Pande Putu Raka, MA
Anggota	: Drs. Rusli Prakarsa
Anggota	: Aditiawan Chandra, Ph.D

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2011 adalah sebesar US\$ 7,6 juta (*Laporan Tahunan*, 2011).

Untuk meningkatkan kompetensi Direksi secara konsisten, Indah Kiat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang ditujukan bagi

karyawan tingkat menengah dan atas (termasuk Direksi), dimana mereka dapat belajar dan berbagi pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang, seperti keuangan, pemasaran, manajemen strategi, dan lain-lain. Direksi juga dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar berhubungan dengan tanggung jawab dan keahliannya masing-masing.

Dengan terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan proses bisnis Indah Kiat dijalankan oleh manajemen secara lebih profesional yang dapat mencapai tujuan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi, daya saing, serta meningkatkan kepercayaan mitra usaha sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan dan mendorong pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan.

3.3 Bidang Usaha dan Jenis Produk

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah di bidang *pulp* dan kertas, pengelolaan pelabuhan khusus, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan M.H Thamrin No.51, Jakarta. Sedangkan ketiga pabriknya terdapat di:

a. Perawang

Jl. Raya Minas-Perawang Km. 26, desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang. Kabupaten Siak, Pekanbaru-Riau 28772.

b. Serang

Jl. Raya Serang Km. 76, desa Kragilan, Serang. Banten 42184.

c. Tangerang

Jl. Raya Serpong Km. 8, Serpong. Tangerang-Banten 15310.

Indah Kiat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, dan kertas industri kemasan (*packaging*) secara terpadu. Kegiatan usaha dimulai dari pengolahan kayu hingga menghasilkan *pulp* dan kertas serta pengolahan kertas bekas hingga menjadi kertas industri, *duplex* dan *ivory board*. Hasil produksi *pulp* digunakan sebagai bahan baku pokok untuk kertas budaya dan bahan baku pelengkap kertas industri yang digunakan oleh Asia Pulp & Paper Company, Ltd atau Grup APP.

Segmen produk kertas industri terutama terdiri dari *linerboard*, *corrugating medium*, *corrugated shipping containers* dan *boxboard*. Produk kertas budaya dijual di bawah *major brand* Paperline, Britex, Copy Paper, PPC Paper, Paperon, IK-Plus, dan e-Paper.

Produk kertas perusahaan terbuat dari *sustainable fiber*, termasuk kertas ECF (*Elemental Chlorine Free*). Selain itu, sebagian produk kertas dan *paperboard* dibuat dengan kertas daur ulang. Semua *fiber*, yang merupakan bahan baku utama kertas yang dibeli perusahaan dari luar berasal dari *supplier* (pihak ketiga) yang bersertifikat dan memiliki kredibilitas baik untuk standar *Sustainable Forest Management* (SFM).

3.4 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan kertas seperti PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk adalah perusahaan yang memanfaatkan hasil alam berupa pohon untuk dijadikan *output* produksi seperti *pulp* dan kertas, jenis perusahaan seperti ini rentan terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Adanya isu lingkungan dan sosial yang terjadi dapat dipastikan dapat memberikan dampak langsung terhadap jalannya kegiatan bisnis perusahaan. Maka untuk membantah isu tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menjalankan kegiatan CSR. CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat tidak hanya terfokus pada kegiatan *charity* tetapi lebih luas dari pada itu memberikan *benefit* serta *value* yang dapat di rasakan oleh semua *stakeholder*.

Indah Kiat secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program CSR dalam bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan serta sosial ekonomi. Program-program CSR tersebut merupakan kelanjutan dari program-program yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Indah Kiat berharap bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan membawa dampak jangka panjang dan memberi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat mengacu pada visi dan misi yang dimiliki perusahaan yaitu berkomitmen untuk mengutamakan perhatian kelestarian lingkungan, keselamatan kerja serta berpartisipasi dalam

pengembangan masyarakat di sekitar pabrik yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan CSR dilaksanakan oleh departemen *General Affair* (GA) dan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan disampaikan ke *Plant manager*. Selain dilaporkan kepada *Plant manager*, tim GA juga bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan kegiatan yang dilakukan kepada Kementerian Lingkungan hidup untuk kegiatan Ranting PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) setiap tahun. Indah Kiat juga melakukan kegiatan CSR untuk menunjang ISO 18000 OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment*) dari SGS, baik secara prosedur maupun dokumentasi.

Indah Kiat secara terus menerus melakukan analisis dan respon terhadap tantangan yang dihadapi dalam bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mendukung strategi CSR yang berkelanjutan. Tujuan berkelanjutan ditetapkan berdasarkan hasil analisis dari setiap kegiatan serta peningkatan manfaat kinerja kegiatan yang dilakukan bagi masyarakat. Implementasi pembangunan berkelanjutan harus bermakna dan relevan pada setiap situasi lokal. Sehingga penerapan dan pengelolaan CSR berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan di tataran lokal walaupun berpedoman pada peraturan dan perundangan yang bersifat nasional bahkan internasional. Pada intinya Indah Kiat berupaya menghidupkan konsep pembangunan berkelanjutan melalui praktik dan implementasi kerja efektif sehari-hari. Hal ini dicapai dengan adanya panduan operasional bagi setiap karyawan Indah Kiat.

Sebagai perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam terdapat potensi terjadinya dampak positif maupun negatif terhadap komunitas tempat perusahaan beroperasi. Indah Kiat memiliki sensitifitas yang tinggi dalam isu-isu yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh karenanya perusahaan berusaha melakukan yang terbaik untuk menghormati hak-hak komunitas masyarakat.

3.5 Sustainability Report (SR)

Indah Kiat bersama dengan APP telah menyelesaikan penyusunan *Sustainability Report* yang ketiga. Laporan ini merangkum kegiatan perusahaan dalam hal sustainabilitas sepanjang tahun 2008-2009 dan saat ini sedang disusun

Sustainability Report keempat yang akan merangkum kegiatan CSR sepanjang tahun 2010-2011. *Sustainability Report* ini disusun berdasarkan standar dan indikator yang terdapat di *Global Reporting Initiative* (GRI). Isi dari laporan tersebut akan melalui proses verifikasi dari pihak ketiga independen, yang melakukan verifikasi berdasarkan standar prinsip dari Institut Akuntabilitas Sosial dan Etika (*Institute for Social and Ethical Accountability*) AA1000.

3.5.1 Pendataan Emisi Karbon

Sebagai langkah awal, untuk mengurangi jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca dalam kegiatan operasinya, APP dan Indah Kiat memulai penyusunan Laporan Emisi Karbon (*Carbon Footprint Assessment*) untuk mengukur tingkat produksi emisi yang dihasilkan saat ini yang akan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana pengurangan emisi dan produksi gas rumah kaca ke depannya, untuk mewujudkan visi jangka panjang perusahaan dalam menghasilkan kertas bebas emisi karbon.

Pada bulan Agustus 2008, APP mempublikasikan hasil dari pendataan emisi karbon tersebut, dimana dijelaskan hasil dari pendataan bahwa tingkat emisi dan produksi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan dalam operasinya berada di bawah batas regulasi industri. Jika penyerapan karbon hutan tanaman dimasukkan dalam perhitungan, rata-rata emisi karbon perusahaan akan menjadi lebih rendah, bahkan mendekati netral.

Sejak tahun 2009, Indah Kiat dan APP melakukan Pendataan Emisi Karbon tahap kedua dengan bekerja sama dengan *Environmental Resources Management* (ERM), sebuah lembaga independen berbasis di Inggris yang merupakan konsultan global terkemuka dalam bidang lingkungan dan sosial. Selain Laporan Emisi Karbon untuk tahun 2007-2008, kajian tahap kedua ini juga meliputi kalkulasi besaran selisih antara laporan sebelumnya dan cara untuk menutup selisih tersebut sesuai dengan Protokol Gas Rumah Kaca (*GHG Protocol*) dan standar ISO 14064. Dalam proyek tersebut juga akan dilakukan pendataan hasil emisi sejumlah produk dari hulu ke hilir (*Life Cycle Assesment*). Pendataan emisi karbon secara lebih mendetil ini merupakan bagian dari

komitmen dan kontribusi perusahaan dalam penanggulangan dampak pemanasan global.

3.5.2 Pendataan Kontribusi Dampak Sosial

Sejak terselesaikannya laporan Pendataan Kontribusi Dampak Sosial pada tahun 2009, Indah Kiat bersama dengan APP mulai melakukan aksi korektif dalam kegiatan CSR serta mulai melakukan perencanaan dan pemantauan lebih baik dalam kegiatan CSR. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas program serta meningkatkan keberlanjutan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal. Kegiatan ekonomi berbasis masyarakat adalah salah satu solusi untuk meningkatkan taraf hidup. Kegiatan peternakan, pertanian, dan kerajinan tangan merupakan solusi untuk menyalurkan tenaga kerja produktif yang tidak terserap. Pelatihan dan pinjaman usaha juga disalurkan untuk menunjang pengusaha lokal.

Dengan fokus pada pemberdayaan melalui pendekatan kolaboratif dengan pemerintah dan masyarakat lokal, Indah Kiat berupaya terus bagi peningkatan kesejahteraan bersama yang dicapai melalui program-program pemberdayaan ekonomi dengan program pelayanan untuk menutupi kesenjangan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat diperluas area cakupannya di luar kegiatan operasional serta peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk akses air dan sanitasi dasar.

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

Salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan CSR dengan menggunakan ISO 26000 sebagai pedoman adalah menghormati kepentingan dari *stakeholder* yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan ISO 26000 adalah dengan melakukan identifikasi siapa saja *stakeholder* yang dimiliki oleh perusahaan dan melakukan pemetaan sesuai dengan hasil identifikasi tersebut.

4.1.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Menurut ISO 26000

Identifikasi *stakeholder* menurut ISO 26000 dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a. Kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban hukum?

Perusahaan memiliki kewajiban hukum kepada Pemerintah lokal dan pusat terkait dengan kewajiban perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga kepada karyawan dalam memenuhi perjanjian kerja yang telah disepakati.

- b. Siapa yang terpengaruh secara negatif maupun positif oleh keputusan dan aktivitas perusahaan?

Yang terpengaruh oleh keputusan dan aktivitas perusahaan adalah masyarakat di sekitar *mill* yang terkena dampak langsung atas limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, serta kontraktor dan pemasok dalam memenuhi kebutuhan material yang dibutuhkan oleh perusahaan.

- c. Siapa yang menyuarakan pernyataan mengenai keputusan dan aktivitas perusahaan?

Yang menyuarakan pernyataan mengenai keputusan dan aktivitas perusahaan adalah karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja Indah Kiat.

- d. Siapa yang biasanya terlibat dalam penyelesaian isu-isu penting?

Yang biasanya terlibat dalam penyelesaian isu-isu penting yang terjadi di

dalam perusahaan adalah Dewan Direksi.

- e. Siapa yang bisa membantu perusahaan dalam mengelola dampak tertentu?

Yang membantu perusahaan dalam mengelola dampak tertentu adalah konsultan yang jasanya digunakan oleh Indah Kiat, misalnya saja konsultan manajemen dalam membantu perusahaan untuk divisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan juga karyawan yang membantu perusahaan dalam menjalankan program CSR.

- f. Siapa yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR-nya?

Yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSRnya adalah masyarakat sekitar *mill* dan karyawan yang menerima dampak dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah sebagai regulator mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, media yang memberitakan isu baik itu isu positif maupun negatif atas dampak kegiatan perusahaan, NGO (*Non Organizational Organization*) yang secara sukarela melakukan pengawasan atas dampak negatif maupun positif atas kegiatan perusahaan, serta pemasok dan kontraktor dalam memenuhi kebutuhan bahan material yang didapat langsung dari alam berupa kayu hasil penebangan.

- g. Siapa yang akan dirugikan kalau tidak dilibatkan?

Yang akan dirugikan jika tidak dilibatkan adalah masyarakat sekitar *mill* dan karyawan karena merekalah yang terkena dampak langsung atas aktivitas dari perusahaan.

- h. Siapa yang terpengaruh sepanjang *value chain*?

Yang terpengaruh sepanjang *value chain* adalah pemasok dan kontraktor dalam memenuhi kebutuhan material, karyawan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, masyarakat sekitar *mill* atas sumber daya yang diambil oleh perusahaan dan juga atas limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, distributor atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan konsumen sebagai pengguna produk.

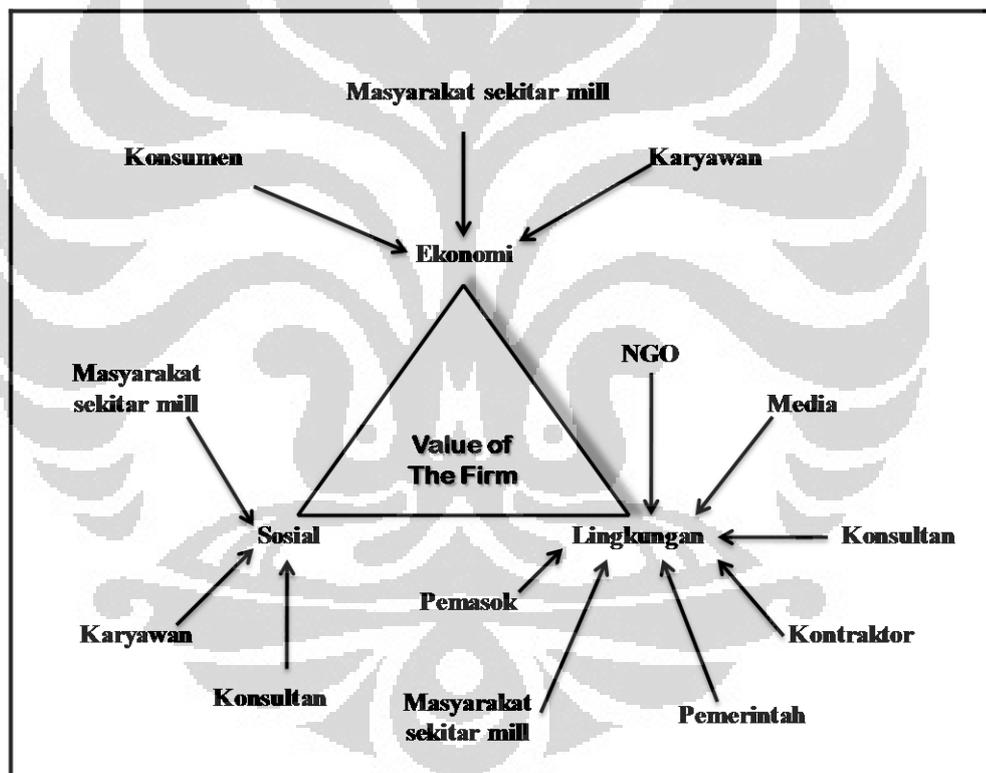
Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* Indah Kiat terdiri dari pemerintah, masyarakat sekitar *mill*, karyawan, pemasok,

kontraktor, distributor, konsumen, konsultan, media, dan *Non Organizational Organization* (NGO).

4.1.2 Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Melalui hasil identifikasi *stakeholder* berdasarkan ISO 26000 maka dapat dilakukan pemetaan *stakeholder* berdasarkan *triple bottom lines* sesuai dengan pengungkapan dan pelaporan yang dilakukan oleh Indah Kiat berdasarkan GRI yang menganut prinsip ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Hasil pemetaan *stakeholder* dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1 Pemetaan *Stakeholder* PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

(Gambar hasil olahan sendiri)

Stakeholder dalam aspek ekonomi adalah konsumen sebagai pengguna produk yang dihasilkan oleh perusahaan dimana konsumen memberikan dampak ekonomi kepada perusahaan berupa pendapatan. Masyarakat di sekitar *mill* pada aspek ini merupakan *stakeholder* yang mendapatkan manfaat ekonomi baik

secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat. Sedangkan karyawan merupakan *stakeholder* yang melakukan aktivitas di dalam perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pada aspek sosial, *stakeholder* yang mendapatkan manfaat langsung atas kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah masyarakat di sekitar *mill* dan karyawan. Karyawan tidak hanya sebagai *stakeholder* yang merasakan manfaat dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tetapi dengan bekerjasama dengan konsultan, karyawan juga sebagai pelaksana dari kegiatan CSR.

Pada aspek lingkungan, perusahaan dibantu oleh konsultan dan bekerjasama dengan kontraktor, pemasok serta NGO (*Non Organizational Organization*) melaksanakan kegiatan CSR untuk menjaga kelestarian lingkungan. NGO pada aspek ini bersama dengan pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, media merupakan sarana bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan melaporkan kegiatan CSR yang telah dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan oleh perusahaan.

4.2 Implementasi ISO 26000

ISO 26000 merupakan pedoman pelaksanaan CSR yang ketujuh subjek intinya dapat diterapkan secara universal oleh seluruh organisasi. Masing-masing tujuh subjek inti dalam ISO 26000 memiliki isu-isu yang ditekankan. Dalam pelaksanaannya, suatu perusahaan diharuskan untuk melakukan seluruh subjek inti tetapi tidak semua isu yang terdapat dalam subjek inti tersebut harus diidentifikasi oleh perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan penerapan ISO 26000 pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk sesuai dengan ketujuh subjek inti dan seluruh isu yang terkait di dalamnya.

4.2.1 Tata Kelola Organisasi

Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem, dan struktur yang memungkinkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan praktik *social responsibility*. Akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap

kepentingan *stakeholder*, dan kepatuhan hukum harus dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan.

Tabel 4.1 Implementasi Tata Kelola Organisasi dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Menerbitkan <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> bersama dengan APP.	1.	Ekonomi aspek kinerja ekonomi: EC1 dan EC2
2.	Membuat Code of Conduct.	2.	Tata Kelola Organisasi

Analisis dampak:

Informasi atas kinerja ekonomi organisasi sangat bermanfaat untuk dapat memahami organisasi dan keberlanjutannya. Apa yang jarang dilaporkan, tapi yang sering diinginkan oleh pembaca laporan berkelanjutan, adalah kontribusi organisasi terhadap keberlanjutan sistem ekonomi dimana organisasi tersebut beroperasi. Suatu organisasi mungkin saja telah layak secara keuangan, namun hal tersebut boleh jadi dicapai dengan menciptakan eksternalitas yang berdampak terhadap pemangku kepentingan lainnya.

Indah Kiat berusaha untuk memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas dengan melaporkan seluruh hasil operasional perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam *annual report* dan juga bersama dengan APP menerbitkan *sustainability report*. *Code of conduct* yang diterbitkan oleh Indah Kiat berisi mengenai visi dan misi perusahaan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan adanya *code of conduct* maka setiap karyawan dapat mengetahui visi dan misi perusahaan serta menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan visi dan misi dari Indah Kiat. Dampak dari adanya tata kelola perusahaan yang baik maka Indah Kiat dapat meningkatkan kepercayaan dari *stakeholder* dan juga *shareholder* yang dimiliki serta meningkatkan citra perusahaan.

4.2.2 Hak Asasi Manusia

Isu yang terdapat di dalam subjek inti hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

a. *Due Diligence*

Perusahaan memaparkan secara jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dampak negatif dan positif atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

b. *Human rights risk situation*

Perusahaan melakukan perhatian khusus berhubungan dengan situasi yang terjadi di dalam perusahaan.

c. *Avoidance of complicity*

Perusahaan menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia baik dalam membantu pelanggaran yang terjadi, memperoleh manfaat atas pelanggaran, dan tidak berkata apapun jika terjadi pelanggaran.

d. *Resolving grievances*

Perusahaan memiliki mekanisme dalam menampung keluhan dari karyawan.

e. *Discrimination and vulnerable groups*

Perusahaan tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun dan kelompok manapun.

f. *Civil and political rights*

Perusahaan memberikan menghormati hak-hak sipil dan politik termasuk hak untuk hidup, hak keamanan, hak kemerdekaan, hak pribadi, dan hak mendapatkan perlakuan yang sama dimuka umum.

g. *Economic, social and cultural rights*

Perusahaan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak menurut ukuran kesehatan fisik dan mental baik untuk dirinya maupun keluarganya.

h. *Fundamental principles and rights at work*

Hak fundamental dalam bekerja.

Tabel 4.2 Implementasi Hak Asasi Manusia Isu *Avoidance of Complicity* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	1.	HAM aspek pekerja anak: HR6
2.	Melakukan proses skrining/ filtrasi aspek HAM kepada para pemasok dan kontraktor.	2.	HAM aspek praktik investasi dan pengadaan: HR1 dan HR2

Analisis dampak:

1. Pekerja anak dibawah umur

Indah Kiat sangat mendukung dan tunduk pada peraturan pemerintah serta konvensi ILO mengenai penghapusan pekerja anak. Dukungan perusahaan ini dapat dilihat pada *Labor policy* (lihat lampiran 4) poin keenam yang menyatakan bahwa Indah Kiat sangat mendukung dan sangat ketat melakukan pengawasan untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia yaitu Undang-undang No. 20 tahun 1999 yang didasarkan pada konvensi ILO tahun 1993 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan juga Undang-undang No.1 tahun 2000 yang didasarkan pada konvensi ILO tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu Indah Kiat bersama dengan APP menyatakan telah mulai mengadopsi “*Protect, Respect and Remedy framework*” yang dikeluarkan oleh *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) (lihat lampiran 5) dimana *guideline* ini menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dilaksanakan sesuai dengan deklarasi ILO.

Penghapusan pekerja anak merupakan prinsip pokok serta tujuan utama deklarasi dan peraturan mengenai hak asasi manusia. Pelaksanaan dan penerapan yang efektif atas kebijakan tentang pekerja anak merupakan harapan yang mendasar terhadap perilaku tanggung jawab sosial. Dengan tidak mempekerjakan anak di bawah umur maka Indah Kiat tunduk pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia serta mereduksi risiko perusahaan yang akan mempengaruhi citra perusahaan.

2. Proses skrining/filtrasi

Dengan adanya proses skrining/filtrasi kepada pemasok dan juga kontraktor maka Indah Kiat dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemasok dan kontraktor tidak melanggar HAM. Hal ini adalah salah satu langkah perusahaan dalam melakukan manajemen risiko yang akan berdampak pada citra perusahaan. Pada kebijakan tenaga kerja poin kedua, Indah Kiat berkomitmen hanya melakukan kerja sama dengan pemasok dan kontraktor yang mengikuti peraturan dan regulasi terkait hak asasi manusia (lihat lampiran 4). Indah Kiat juga menyatakan mulai menerapkan “*Protect, Respect and Remedy framework*” yang dikeluarkan oleh *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* (lihat lampiran 5) dimana *guideline* ini mengatur mengenai penghormatan hak asasi manusia baik itu di dalam perusahaan dan juga sepanjang *supply chain* yang melibatkan pemasok dan kontraktor perusahaan.

Proses skrining/filtrasi dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan PR/OP/01 mengenai prosedur prakualifikasi kontraktor proyek, DC/OP/14 mengenai prosedur evaluasi subkontraktor dan juga sesuai dengan instruksi kerja perusahaan PR/WI/02 mengenai evaluasi *vendor*.

Tabel 4.3 Implementasi Hak Asasi Manusia Isu *Due Diligence* serta Isu *Discrimination and Vulnerable Group* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Pemenuhan hak-hak karyawan: a. Membayar gaji sesuai UMR b. Memberikan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan c. Memberikan asuransi kesehatan dan jaminan sosial bagi karyawan tetap d. Tidak mentoleransi adanya diskriminasi di dalam perusahaan	1.	Ekonomi aspek kinerja ekonomi: EC1
		2.	Ekonomi aspek kehadiran pasar tenaga kerja: EC5
		3.	HAM aspek nondiskriminasi: HR4
		4.	HAM aspek kerja paksa dan kerja wajib: HR7
		5.	Tenaga kerja aspek pekerjaan: LA3

Analisis dampak:

Dalam *Labor Policy* (lihat lapiran 4) Indah Kiat menyatakan pada poin pertama dan ketujuh bahwa perusahaan tunduk pada Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan memberikan jaminan sosial sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992. Pada poin ketiga dalam kebijakan ini perusahaan tidak memperkenankan adanya tindakan diskriminasi di dalam perusahaan baik itu berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, maupun ras sehingga karyawan dapat merasa nyaman bekerja di dalam perusahaan tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Indah Kiat bersama dengan APP juga tidak membenarkan segala bentuk kerja paksa dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan poin kelima.

Dengan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh karyawan maka Indah Kiat menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, menciptakan loyalitas karyawan, serta memperkuat pengakuan sosial atas perusahaan (*social license to operate*) sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan.

Tabel 4.4 Implementasi Hak Asasi Manusia Isu *Human Rights Risk Situation* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Memberikan pelatihan terkait situasi penuh risiko.	1.	HAM aspek kesehatan dan keselamatan: HR5, HR6, dan HR7

Analisis dampak:

Salah satu perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh Indah Kiat adalah dengan memberikan pelatihan berkaitan dengan situasi penuh risiko. Beberapa pelatihan yang diberikan kepada karyawan serta masyarakat yang terkait dengan situasi khusus di dalam perusahaan termasuk program pertolongan pertama, *emergency response*, dan tanggap kebakaran seperti *mill* Tangerang mengadakan pelatihan bagi karyawan jika terjadi kebakaran dan program *emergency response and first aid* yang diadakan bagi masyarakat sekitar dan *mill* Serang mengadakan *training toxic fire fighting* yang diikuti oleh karyawan Indah Kiat Serang dan juga para kontraktor.

Setiap *mill* Indah Kiat terdapat banyak sekali bahan yang mudah terbakar sehingga perusahaan melakukan berbagai pelatihan yang terkait dengan situasi penuh risiko agar jika terjadi situasi kebakaran atau situasi yang membahayakan bagi perusahaan dan masyarakat, maka karyawan dibantu dengan masyarakat dapat segera tanggap terhadap situasi tersebut dan juga dapat segera melakukan pertolongan pertama. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan instruksi kerja GA/WI/14 mengenai simulasi kejadian darurat, EI/WI/07 mengenai penanggulangan keadaan darurat zat radioaktif, dan sesuai dengan prosedur operasional DM/OP/01 mengenai menghadapi keadaan darurat.

Tabel 4.5 Implementasi Hak Asasi Manusia Isu *Civil and Political Rights* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Memberikan <i>training</i> terkait HAM kepada petugas keamanan.	1.	HAM aspek praktik investasi dan pengadaan: HR3
		2.	HAM aspek praktik/tindakan pengamanan: HR8

Analisis dampak:

Indah Kiat membekali petugas keamanan yang dimiliki dengan pelatihan terkait masalah HAM dalam rutinitas kerja. Pelatihan ini sangat berguna bagi petugas dalam memberikan keamanan kepada karyawan dan masyarakat sekitar tanpa melanggar HAM dan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja GA/WI/04 mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satpam. Banyaknya karyawan yang telah dilatih serta banyaknya pelatihan yang telah diberikan, memberikan kontribusi penilaian yang bagus kepada perusahaan tentang hak asasi manusia.

Tabel 4.6 Implementasi Hak Asasi Manusia Isu *Fundamental Principles and Rights at Work* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Adanya serikat pekerja Indah Kiat.	1.	HAM aspek nondiskriminasi: HR4

Universitas Indonesia

Analisis dampak:

Indah Kiat sangat menyadari bahwa karyawan merupakan bagian terpenting dalam menjaga kelancaran proses bisnisnya. Dukungan dari perusahaan dapat dilihat dalam kebijakan tenaga kerja poin keempat dan kelima (lihat lampiran 4). Pada kebijakan ini perusahaan menyatakan tidak menerima dan melakukan kerja paksa sesuai dengan UU No19 tahun 1999 yang didasarkan pada konvensi ILO tahun 1957 mengenai penghapusan kerja paksa dan menghargai kebebasan berserikat karyawan sesuai dengan UU No. 83 tahun 1998 yang didasari pada Konvensi ILO tahun 1948 mengenai Kebebasan berserikat dan hak berunding bersama.

Dengan adanya dukungan terhadap serikat pekerja ini maka karyawan merasa tidak dibatasi atas haknya dalam mengemukakan pendapat dan juga hak dalam kebebasan berserikat.

4.2.3 Praktik Ketenagakerjaan

Menurut ILO Philadelphia (1944) disebutkan bahwa pekerja bukan merupakan komoditas perusahaan dan menurut deklarasi HAM dan *International Covenant on Economic Social and Cultural Right* (ECOSOC) dikatakan bahwa pekerja adalah kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan.

Hak yang dimaksud adalah mendapatkan penghidupan yang layak dari pekerjaan pilihan dan kondisi kerja yang baik. Isu yang terkait dalam praktik ketenagakerjaan adalah:

- a. Pekerja dan hubungan ketenagakerjaan
- b. Kondisi kerja dan jaminan sosial para pekerja
- c. Dialog sosial

Dialog sosial mencakup semua jenis negosiasi, konsultasi atau pertukaran informasi antara atau di antara wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja, mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial.

- d. *Health and safety at work* (kesehatan dan keselamatan kerja)

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerja, perusahaan, maupun bagi masyarakat

dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat bekerja.

- e. *Human development and training in the work place* (pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan)

Tabel 4.7 Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu Pekerja dan Hubungan Ketenagakerjaan serta Isu Dialog Sosial dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan jika terjadi perubahan di dalam perusahaan.	1.	Tenaga kerja aspek pekerjaan: LA1, LA2, dan LA3
		2.	Tenaga kerja aspek hubungan tenaga kerja dengan manajemen: LA4
2.	Pemberian waktu minimum sebelum kebijakan yang baru diimplementasikan di dalam perusahaan.	3.	Tenaga kerja aspek hubungan tenaga kerja dengan manajemen: LA5

Analisis dampak:

1. Pelibatan karyawan

Pelibatan karyawan dilakukan perusahaan dengan adanya perwakilan dari karyawan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan pada kegiatan operasional *mill* yang akan berdampak langsung kepada pekerja, misalnya saja perubahan jam kerja untuk *shift* pagi dan *shift* malam.

Dengan adanya pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan jika terjadi perubahan di dalam perusahaan, maka karyawan merasa menjadi bagian dari perusahaan sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Dan bagi perusahaan hal ini sangat penting dalam menjaga kelancaran kegiatan di dalam perusahaan dan juga hubungan baik antara perusahaan dan karyawannya.

2. Pemberian waktu minimum

Tenggang waktu pemberitahuan minimal menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tingkat kepuasan dan motivasi karyawan

ketika perusahaan melakukan perubahan penting yang berdampak langsung terhadap pekerja atas kegiatan operasi. Jika terjadi perubahan di dalam perusahaan maka Indah Kiat melalui serikat pekerjanya memberikan waktu minimum seminggu sebelum kebijakan tersebut resmi dijalankan sesuai dengan perjanjian kerja bersama.

Hal ini sangat berguna bagi para perwakilan karyawan yang ikut dalam pengambilan keputusan tersebut untuk mensosialisasikan perubahan kebijakan dan juga karyawan memiliki waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan tersebut.

Tabel 4.8 Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu *Health and Safety at Work* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Memiliki divisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).	1.	Tenaga kerja aspek kesehatan dan keselamatan kerja: LA6, LA7, LA8, dan LA9
2.	Memberikan pelatihan dan prosedur mengenai pemakaian mesin.		
3.	Memfasilitasi karyawan dengan peralatan dan perlengkapan keamanan dalam bekerja.		
4.	Larangan merokok di lingkungan <i>mill</i> .		

Analisis dampak:

1. Divisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Perwakilan gabungan dalam divisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dapat mempermudah budaya positif kesehatan dan keselamatan. Dengan adanya divisi ini merupakan salah satu cara perusahaan mengikutsertakan karyawan dan berperan serta aktif dalam peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh divisi K3 diantaranya adalah melakukan inspeksi sesuai dengan petunjuk operasional GA/OP/09 mengenai prosedur inspeksi K3, melakukan pengadaan alat-alat K3 sesuai dengan petunjuk operasional GA/OP/19, dan melakukan pemeliharaan peralatan K3 sesuai dengan petunjuk operasional GA/OP/20.

Universitas Indonesia

Indah Kiat berkomitmen untuk terus menjaga implementasi dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja dan lingkungan sekitar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan selalu melakukan evaluasi terhadap divisi K3 sesuai dengan petunjuk operasional perusahaan DC/OP/03 mengenai perencanaan mutu, lingkungan, dan K3.

Indah Kiat memiliki sistem K3 yang baik dan hal ini dapat tercermin dari adanya sertifikat SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang diperoleh perusahaan. Sertifikat SMK3 ini berlaku hingga tahun 2014 untuk *mill* Perawang dan *mill* Serang, dan hingga tahun 2015 untuk *mill* Tangerang. Selain itu sistem manajemen K3 juga telah dievaluasi oleh badan audit independen dan Indah Kiat berhasil memperpanjang OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment*) yang merupakan sebuah standar global untuk sistem kesehatan dan keselamatan kerja hingga tahun 2015.

2. Prosedur dan pelatihan pemakaian mesin

Kinerja kesehatan dan keselamatan merupakan ukuran kunci bagi kepedulian perusahaan. Mesin dan peralatan yang dipakai oleh Indah Kiat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, untuk itu perusahaan memberikan *training* dan prosedur serta instruksi kerja yang jelas mengenai mesin dan peralatan yang dipakai di dalam perusahaan kepada karyawannya. Prosedur yang ada meliputi petunjuk operasional dan instruksi kerja mengenai pemakaian mesin atau peralatan dan juga mengenai pemeliharaan yang harus dilakukan terhadap mesin dan peralatan yang dipakai oleh perusahaan.

Perusahaan juga terus melakukan pembaharuan atas instruksi kerja dan standar petunjuk operasional tersebut. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat menjalankan mesin dan peralatan yang ada dengan baik sehingga kelancaran aktifitas di dalam perusahaan dapat terjaga serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja di dalam perusahaan.

3. Fasilitas peralatan dan perlengkapan kerja

Selain memberikan pelatihan dan prosedur yang jelas, perusahaan melalui divisi K3 juga memfasilitasi karyawan dengan peralatan dan perlengkapan keamanan dalam bekerja sehingga karyawan merasa keamanan

mereka terlindungi dan karyawan merasa tenang dalam melakukan kegiatannya di dalam perusahaan. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan keamanan ini sesuai dengan petunjuk operasional perusahaan GA/OP/19 mengenai pengadaan peralatan K3 dan GA/OP/20 mengenai pemeliharaan peralatan K3.

Jaminan atas pemberian fasilitas ini juga dinyatakan oleh perusahaan dalam kebijakan mengenai tenaga kerja yang menyatakan bahwa Indah Kiat melindungi karyawannya sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 mengenai keselamatan dalam bekerja (lihat lampiran 4).

4. Larangan merokok

Sesuai dengan kebijakan perusahaan di dalam DC/CP/01, merokok sangat dilarang di lingkungan *mill* karena bukan hanya tidak baik bagi kesehatan, merokok juga bisa sangat membahayakan *mill*. Larangan merokok berlaku bagi siapa saja yang ada di dalam lingkungan *mill*, baik pekerja, *supplier* maupun tamu yang datang ke *mill* dan perusahaan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 jika ditemukan orang yang merokok di lingkungan *mill*. Larangan ini sangat ketat diberlakukan di dalam lingkungan *mill* karena banyak sekali terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar.

Tabel 4.9 Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu Kondisi Kerja dan Jaminan Sosial Pekerja dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Pemberian asuransi kecelakaan kerja.	1.	Tenaga kerja aspek kesehatan dan keselamatan kerja: LA7, LA8, dan LA9

Analisis dampak:

Pemberian asuransi kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur perusahaan GA/OP/11 mengenai penanganan insiden kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya sebagai salah satu *stakeholder* perusahaan. Dalam kebijakan mengenai tenaga kerja poin keenam (lihat lampiran 4), Indah Kiat menyatakan bahwa perusahaan memberikan jaminan kecelakaan

kerja sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 mengenai jaminan sosial tenaga kerja dan bekerjasama dengan Jamsostek menyediakan asuransi kecelakaan kerja sesuai dengan PP No. 14 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Dengan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut maka perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan di kalangan masyarakat.

Tabel 4.10 Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu *Human Development and Training in Work Place* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan di tiap level: a. <i>Executive Management Program</i> b. <i>Strategic Management Program</i> c. <i>Management Development Program</i> d. <i>Advanced Supervisory</i> e. <i>Basic Supervisory</i> f. <i>Management Trainee</i> g. <i>Talent Management</i>	1.	Tenaga kerja aspek pelatihan dan pendidikan: LA10 dan LA11
2.	Pemberian pelatihan atau bantuan pekerjaan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun.		

Analisis dampak:

1. Pendidikan dan pelatihan di tiap level

Memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan yang memperluas dasar pengetahuan karyawan, merupakan kunci dalam pengembangan suatu perusahaan sehingga Indah Kiat berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini melalui program kegiatan pelatihan internal maupun eksternal. Akses untuk mendapatkan kesempatan pelatihan juga dapat menunjang kemajuan lain di bidang kinerja sosial, seperti jaminan mendapatkan kesempatan setara di tempat kerja.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan

Universitas Indonesia

sesuai dengan kebijakan perusahaan HR/OP/02 mengenai prosedur *training*, maka akan terjadi regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat menengah dan atas serta mendorong pengembangan pribadi karyawan sesuai dengan salah satu misi perusahaan yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan saat ini perusahaan telah mempekerjakan karyawannya dengan perencanaan karir yang terprogram.

2. Pelatihan karyawan memasuki usia pensiun

Sesuai dengan visi perusahaan yaitu memberikan yang terbaik bagi karyawan, program pelatihan ini dibuat untuk membekali pegawai yang memasuki usia pensiun sesuai dengan kebijakan perusahaan HR/OP/02 mengenai prosedur *training* sehingga dengan adanya program ini maka akan meningkatkan kepercayaan diri karyawan dalam masa transisi dari bekerja menjadi pensiun.

Tabel 4.11 Implementasi Praktik Ketenagakerjaan Isu Pekerja dan Hubungan Ketenagakerjaan dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Mengadakan kegiatan-kegiatan: a. <i>Family Gathering</i> b. <i>Tea Walk</i> c. Pemilihan <i>Best Employee</i> d. Kompetisi Bipartit e. Sosialisasi GCG f. Pelayanan Kesehatan g. Teguh <i>Cup V</i>	1.	Tenaga kerja aspek hubungan tenaga kerja dengan manajemen: LA5
		2.	Tenaga kerja aspek kesehatan dan keselamatan kerja: LA8

Analisis dampak:

Kegiatan-kegiatan dalam lingkungan perusahaan di atas berguna untuk meningkatkan hubungan yang erat diantara karyawan perusahaan, memotivasi karyawan dan membangun semangat dan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan perusahaan. Hal ini dilakukan oleh Indah Kiat karena perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan diharapkan karyawan dapat

menumbuhkan semangat kebersamaan, menciptakan situasi kerja dan iklim produktivitas yang lebih kondusif.

4.2.4 Lingkungan

Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Isu yang terkait dengan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. *Prevention and Pollution* (pencegahan polusi)
- b. *Sustainable Resource Use* (penggunaan sumber daya berkelanjutan)
- c. *Climate Change Mitigation and Adaption* (adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)
- d. *Protection The Environment*

Salah satu komitmen misi Indah Kiat dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan adalah selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan dengan menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan bersama dengan pemasok bahan baku kayu yang bernaung di bawah Sinar Mas Forestry. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat dalam menjalankan misi dari perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Implementasi Lingkungan Isu *Sustainable Resource Use* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Menjalankan program 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>).	1.	Lingkungan aspek material: EN2
		2.	Lingkungan aspek energi: EN5, EN6, dan EN7
		3.	Lingkungan aspek air: EN10
		4.	Lingkungan aspek emisi, fluen, dan limbah: EN18, EN20, EN21, EN22, dan EN24
		5.	Lingkungan aspek produk dan jasa: EN26

Analisis dampak:

Melalui program 3R, Indah Kiat juga dapat mereduksi biaya yang dikeluarkan dan menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar *mill* yang

Universitas Indonesia

merasakan langsung dampak atas polusi dan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketiga *mill* Indah Kiat telah meraih sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan terbaru yaitu ISO 14001:2004 hingga tahun 2012 untuk *mill* Perawang, 2013 untuk *mill* Serang, dan 2014 untuk *mill* Tangerang.

Dalam sistem pengolahan air limbah, perusahaan menggunakan sistem endapan (*sludge*) aktif dengan perlakuan fisikal dan kimiawi untuk membuat air limbah, perusahaan menggunakan sistem endapan (*sludge*) aktif dengan perlakuan fisikal dan kimiawi untuk membuat air limbah dapat dialirkan secara aman ke saluran air. Perusahaan menjalankan sistem ini sesuai dengan kebijakan perusahaan DC/OP/11 mengenai petunjuk operasional pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya), instruksi kerja MM/WI/21 mengenai penanganan limbah B3, dan instruksi kerja MM/OP/08 mengenai prosedur penanganan bahan kimia yang tidak dipakai lagi.

Perusahaan juga bekerjasama dengan PT. Indocement selaku kontraktor perusahaan untuk menangani limbah B3 dalam bentuk padat sesuai dengan instruksi kerja GA/WI/02 mengenai pengiriman limbah B3. *Mill* Serang memiliki *waste water treatment system* yang mengolah gas metana dari air limbah menjadi pasokan energi yang digunakan dalam proses produksi. Sistem ini mendapatkan *Papyrus Award* di *World Recycling Convention* yang diselenggarakan di Brussel, Belgia pada bulan Oktober 2010.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang disusun oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam kinerja suatu perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2011, dua fasilitas pabrik Indah Kiat memperoleh peringkat PROPER. PROPER Biru untuk fasilitas produksi *mill* Perawang dan PROPER Hijau untuk fasilitas produksi *mill* Tangerang. Peringkat PROPER ini diberikan kepada pabrik yang beroperasi dengan tingkat emisi di bawah ketentuan regulasi pemerintah serta menggunakan teknologi ramah lingkungan, meminimalisasi limbah, mencegah polusi dan menghemat sumber daya.

Dengan sistem manajemen lingkungan yang baik melalui berbagai ISO serta PROPER yang didapat perusahaan maka akan berdampak positif bagi citra perusahaan.

Tabel 4.13 Implementasi Lingkungan Isu *Protection Environment* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Menjalankan program Lacak Balak <i>Chain of Custody/CoC</i>) untuk sistem pasokan bahan baku.	1.	Lingkungan aspek material: EN1
2.	Melakukan pengembangan Kawasan Konservasi Harimau Sumatera Senepis-Buluhala.	2.	Lingkungan aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati): EN11, EN12, EN13, EN14 dan EN15
3.	Mendirikan cagar biosfer.		

Analisis dampak:

1. Program Lacak Balak

Seluruh bahan baku yang digunakan oleh Indah Kiat memiliki dokumentasi yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak. Perusahaan menerapkan program Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) sesuai dengan kebijakan perusahaan COC/CP/01 mengenai PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) guna memastikan tidak ada bahan baku ilegal masuk ke dalam rantai pasokan.

Pada tahun 2010 seluruh *mill* Indah Kiat berhasil memperoleh sertifikasi Lacak Balak yang berlaku hingga tahun 2014 di bawah standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) dengan menyelesaikan audit *surveillance*. PEFC adalah program pengesahan standar sertifikasi hutan internasional terkemuka yang mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang bertanggungjawab. Dengan memiliki sertifikasi PEFC, dapat dijamin bahwa suatu produk terdiri dari bahan baku yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

Untuk menjamin kredibilitas sistem lacak balak, prosedur yang dijalankan diaudit oleh badan sertifikasi independen yang dikenal sebagai *Audit Non-Controversial* untuk memastikan sistem ini tetap ampuh mencegah bahan baku ilegal atau kontroversial masuk ke dalam proses produksi. Penerapan sistem dan prosedur pengadaan bahan baku ini telah diverifikasi ulang dan memperoleh sertifikasi lacak balak (*Chain-of-Custody/CoC*) dari

Universitas Indonesia

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Sertifikasi ini merupakan bukti bahwa Indah Kiat sungguh-sungguh menjalankan bisnis yang menggunakan bahan baku dari sumber yang terlacak jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu perusahaan juga mulai mengimplementasikan sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SLVK. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK merupakan sistem yang diajukan para pemangku kepentingan industri di Indonesia untuk memastikan semua produk kayu yang diperdagangkan dan beredar telah memiliki status legalitas dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sistem Legalitas Kayu dan Verifikasi Asal-Usul Verifikasi Legalitas Sumber (TLTVVO) juga telah dievaluasi oleh pihak ketiga, yaitu SGS (*Société Générale de Surveillance*).

Untuk pembelian *pulp* dari pasar internasional, perusahaan hanya membeli *pulp* yang telah mendapat sertifikasi lingkungan yang memenuhi standar dan kriteria CSA, FSC, PEFC, atau SFI.

Dengan pendokumentasian bahan baku yang terjamin dan sertifikasi yang diwajibkan kepada pemasok maka Indah Kiat menjamin legalitas dari pasokan bahan baku sehingga perusahaan dapat menepis isu terkait lingkungan yang menimpa perusahaan. Selain itu perusahaan juga dapat menjadikan sistem pasokan bahan baku ini sebagai salah satu *competitive advantage* yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Pengembangan Kawasan Konservasi

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dan pemasok bahan baku kayunya berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati sesuai dengan komitmen perusahaan yang bertajuk "*Conservation beyond Compliance*". Pada tahun 2010, perusahaan dan pemasok bahan baku kayunya secara berkelanjutan berkontribusi dalam pengembangan Kawasan Konservasi Harimau Sumatera Senepis-Buluhala. Pada tahun 2007, perusahaan dan pemasok bahan baku kayunya bekerjasama dengan beberapa pemegang konsesi hutan yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat membuat dan mendanai pengembangan cagar alam harimau seluas lebih dari 100.000 hektar di Provinsi Riau, Sumatera.

Di tahun 2008, Indah Kiat dan pemasok bahan bakunya ambil bagian dalam berbagai kegiatan Kelompok Kerja Cagar Alam Senepis Buluhala yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Harimau Sumatera dan habitatnya, serta menghindari konflik manusia dan harimau di area konservasi tersebut dan salah satu aktivitasnya adalah pemasangan papan tanda batas di luar wilayah yang dilindungi guna menunjukkan batas wilayah yang jelas sehingga tidak terjadi lagi aktifitas ilegal di dalam wilayah konservasi. Aktivitas ilegal yang sering terdapat di wilayah cagar alam ini merupakan salah satu faktor utama yang mengancam keberadaan Harimau Sumatera dan keutuhan habitatnya.

3. Cagar Biosfer

Contoh lain komitmen Indah Kiat dalam ”*Conservation beyond Compliance*” adalah inisiatif perusahaan dalam mendirikan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil–Bukit Batu (GSK-BB) di Provinsi Riau, Sumatera. Cagar biosfer ini dirancang untuk menjawab salah satu isu yang dihadapi dunia saat ini, yaitu menyeimbangkan antara konservasi alam dengan pengembangan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Bekerjasama dengan Departemen Kehutanan Riau, APP, dan Sinar Mas Forestry, Indah Kiat terus bergerak maju dalam penyusunan rencana pembangunan Cagar Biosfer Riau. Rencana pengelolaan cagar biosfer seluas lebih dari 100.000 hektar hutan lindung ini mengikuti model yang disusun oleh UNESCO dan menjadi cagar alam yang unik karena selain akan menjadi habitat bagi berbagai macam jenis flora dan fauna langka, juga terdapat wilayah hutan gambut.

Pada bulan September 2008, Cagar Biosfer GSK-BB diusulkan ke UNESCO-Paris melalui Komite Nasional *Program Man and Biosphere* dan merupakan cagar biosfer pertama di dunia yang merupakan inisiatif dari industri kehutanan. Pada bulan Mei 2009, Cagar Biosfer ini mendapatkan pengakuan resmi dari program *Man and Biosphere* UNESCO. Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang *21st Session of the International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (MAB/ICC)*-UNESCO di Jeju, Korea Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 24-29 Mei 2009. Cagar Biosfer seluas 178.000 hektar adalah satu dari 22 cagar biosfer dari 17 negara yang mendapat pengakuan UNESCO.

Tabel 4.14 Implementasi Lingkungan Isu *Prevention and Pollution* Serta Isu *Climate Change Mitigation and Adaption* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Melakukan pendataan emisi karbon.	1.	Lingkungan aspek emisi, fluen, dan limbah lingkungan: EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23, EN24, dan EN25

Analisis dampak:

Sebagai langkah untuk mengurangi jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca dalam kegiatan operasinya, APP dan Indah Kiat memulai penyusunan Laporan Emisi Karbon (*Carbon Footprint Assessment*) untuk mengukur tingkat produksi emisi yang dihasilkan saat ini yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana pengurangan emisi dan produksi gas rumah kaca ke depannya, untuk mewujudkan visi jangka panjang perusahaan dalam menghasilkan kertas bebas emisi karbon.

Pendataan emisi karbon tersebut dipublikasikan pada bulan Agustus 2008. Dalam laporan pendataan emisi karbon ini dijelaskan bahwa tingkat emisi dan produksi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indah Kiat dalam operasinya berada di bawah batas regulasi industri. Jika penyerapan karbon hutan tanaman dimasukkan dalam perhitungan, maka rata-rata emisi karbon Indah Kiat akan menjadi lebih rendah, bahkan mendekati netral. Sejak tahun 2009, Indah Kiat bersama dengan APP melakukan Pendataan Emisi Karbon perusahaan tahap kedua dengan bekerja sama dengan *Environmental Resources Management* (ERM).

Pada bulan Oktober 2010, Indah Kiat bekerjasama dengan *Carbon Conservation* selaku konsultan Internasional untuk mengatur suatu desain proyek, menilai dan memverifikasi penyimpanan karbon (PAN-Karbon) berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Permenhut No. P.36/menhut-II/2009 mengenai cara perijinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Riau yang kemudian menghasilkan *Kampar Carbon Reserve*.

Pembentukan *Kampar Carbon Reserve* ini dilakukan oleh Indah Kiat sebagai investor utama bersama dengan APP dan salah satu pemasoknya yaitu PT. Putra Riau Perkasa yang merupakan perusahaan dari kelompok Sinarmas Forestry. Proyek ini kemudian diimplementasikan oleh *Improved Forestry Management* (IFM) dengan melakukan kegiatan *Afforestation Reforestation and Re-vegetation* (ARR) bersama dengan Kementerian Kehutanan dan para pemangku kepentingan lokal. Diharapkan proyek ini akan memberikan dampak besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menghasilkan karbon kredit dari program *Reduced Emissions dari Deforestation and Degradation* (REDD)+.

4.2.5 Praktik Operasi yang Adil

Praktik operasi yang adil merujuk pada etika organisasi dalam berhubungan dengan organisasi lainnya.

Isu yang terkait dalam subjek inti ini adalah:

- a. *Anti-corruption* (Anti Korupsi)
- b. *Responsible Political Involvement* (Keterlibatan yang bertanggungjawab dalam Politik)

Salah satu tujuan dari isu ini adalah perusahaan diharapkan menghindari kontribusi politik dalam jumlah yang besar dengan maksud mempengaruhi atau mengontrol pengambilan kebijakan.

- c. *Fair Competition* (Persaingan yang adil)
- d. *Promoting Social Responsibility In The Value Chain* (Promosi CSR dalam value chain)

Organisasi dapat mempengaruhi organisasi lainnya sepanjang rantai nilai baik itu melalui kepemimpinan dan pembimbingan untuk mempromosikan dan mendukung prinsip serta praktik CSR.

- e. *Respect For Property Rights* (Penghargaan atas hak kepemilikan)
- Hak-hak kepemilikan meliputi dua hal yaitu kepemilikan fisik dan kepemilikan intelektual.

Tabel 4.15 Implementasi Praktik Operasi yang Adil Isu *Anti-corruption* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Program “ <i>Whistle Blowing</i> ”.	1.	Masyarakat aspek korupsi: S02, S03, dan S04
2.	Membuat booklet “Ayo menjadi karyawan teladan”.		
3.	Memberikan pelatihan anti korupsi.		

Analisis dampak:

Korupsi dapat menjadi risiko yang signifikan bagi reputasi organisasi dan bisnis. Perusahaan dituntut oleh pasar, aturan internasional, dan *stakeholder* untuk menunjukkan perannya terkait dengan integritas, tata kelola, dan pengembangan praktik bisnis yang baik. Bagi *stakeholder* ada dua jenis kepentingan yaitu mencegah terjadinya korupsi dan bagaimana organisasi menanggapi kejadian tersebut.

Sejak tahun 2008 Indah Kiat bersama dengan APP memiliki program yang dinamakan “*Whistle Blowing*” untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam perusahaan. Program ini dipimpin langsung oleh *Internal Control and Audit Division* (ICAD) APP. Indah Kiat menjalankan audit secara berkala pada setiap anak perusahaan dan juga *mill* terutama pada departemen-departemen yang dinilai memiliki tingkat kemungkinan terjadinya korupsi yang tinggi seperti departemen keuangan dan juga departemen yang memiliki komunikasi secara berkala dengan pihak luar seperti departemen pemasaran, pembelian, dan penjualan.

ICAD juga menyediakan *call center* dan kontak *e-mail* pada *website* sebagai sarana dalam menerima laporan mengenai korupsi yang terjadi dan menginvestigasi setiap laporan yang masuk. Jika hasil investigasi membuktikan bahwa ada karyawan yang melakukan tindakan korupsi maka perusahaan akan memberikan peringatan sesuai dengan tindakan korupsi yang dilakukan sesuai dengan prosedur HR/OP/04 mengenai pengajuan sanksi. Peringatan yang diberikan bisa berupa surat peringatan atau bahkan surat pemecatan. Dan perusahaan akan memutuskan kerjasama kepada pihak pemasok yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Pemasok yang terbukti melakukan tindakan korupsi

Universitas Indonesia

tidak dapat melakukan kerjasama bukan hanya kepada Indah Kiat saja, tetapi juga kepada seluruh perusahaan di bawah grup APP.

Upaya untuk mengelola risiko reputasi yang timbul dari praktik korupsi oleh karyawan atau rekan bisnis membutuhkan sebuah sistem yang didukung prosedur yang tepat. Untuk mendukung program ini, pelatihan merupakan sebuah elemen yang penting dalam rangka membangun kesadaran internal dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mencegah kejadian korupsi. Selain itu Indah Kiat juga membuat suatu *booklet* yang berjudul “Ayo Menjadi Karyawan Teladan” dan juga membuat film sederhana yang memaparkan isi *booklet* tersebut sehingga karyawan dapat lebih mudah memahami isinya.

Tabel 4.16 Implementasi Praktik Operasi yang Adil Isu *Respect for Property Rights* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Penerapan sistem <i>i-suggest</i> .	1.	Masyarakat aspek kepatuhan: S08
2.	Menggunakan suku cadang asli.		
3.	Menggunakan <i>software</i> asli.		

Analisis dampak:

Indah Kiat juga memiliki sistem yang dinamakan *i-suggest* dimana setiap karyawan yang memiliki ide terkait dengan kemajuan operasional perusahaan dapat memasukkan idenya melalui sistem tersebut sesuai dengan prosedur MBOS/SOP-IS/2010/01 mengenai *i-suggest*. Bagi karyawan yang idenya digunakan oleh Indah Kiat maka karyawan yang bersangkutan akan mendapatkan imbalan dari perusahaan.

Indah Kiat juga menghormati hak cipta dengan menggunakan suku cadang asli pada mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya dan juga menggunakan *software* asli dalam seluruh sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan sesuai dengan prosedur PR/OP/03 mengenai pembelian barang.

Dari perspektif ekonomi, penghormatan atas hak cipta yang merupakan kewajiban perusahaan dapat membantu dalam mengurangi risiko finansial yang

dapat terjadi baik secara langsung akibat denda maupun secara tidak langsung sebagai dampak dari reputasi yang buruk.

4.2.6 Konsumen

Dalam berhadapan dengan konsumen, perusahaan haruslah bersikap jujur dalam menjalankan bisnis, melakukan pemasaran, dan menjamin kualitas serta ketersediaan atas produk dan jasa yang dihasilkan. Delapan hak konsumen adalah pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan, informasi, memilih, didengarkan, penyelesaian klaim, edukasi, dan lingkungan yang sehat.

Isu yang terkait dengan konsumen adalah:

- a. *Fair Marketing, Factual and Unbiased Information and Fair Contractual Practices* (Pemasaran yang Jujur, Faktual, dan Tidak Bias)
- b. *Protecting Consumer's Health and Safety* (Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Konsumen)
- c. *Sustainable Consumption* (Konsumsi yang Berkelanjutan)
- d. *Consumer Service, Support, Complaint and Dispute Resolution* (Layanan Konsumen, Dukungan, dan Penyelesaian Keluhan)
- e. *Consumer Data Protection and Privacy* (Perlindungan Data dan Kerahasiaan Konsumen)
- f. *Access to Essential Services* (Akses Terhadap Layanan Esensial)
- g. *Education and Awareness* (Edukasi dan Penyadaran)

Tabel 4.17 Implementasi Konsumen Isu *Consumer Service, Support, Complaint and Dispute Resolution* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Menyediakan nomor kontak bebas pulsa dan juga form keluhan pada <i>website</i> resmi perusahaan untuk menampung keluhan dari pelanggan dan memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan kepada pelanggan.	1.	Tanggung jawab produk aspek pemasangan label bagi produk dan jasa: PR5
		2.	Tanggung jawab produk aspek kepatuhan: PR9

Analisis dampak:

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran kepekaan perusahaan terhadap kebutuhan pelanggannya dan bagi perusahaan kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks keberlanjutan, kepuasan pelanggan dapat memberikan petunjuk bagaimana perusahaan menjaga hubungan dengan konsumen yang merupakan salah satu *stakeholder* yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap keluhan yang disampaikan kepada perusahaan akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur perusahaan DC/OP/17 mengenai komplain konsumen.

Tabel 4.18 Implementasi Konsumen Isu *Protecting Consumer's Health and Safety* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Sistem manajemen mutu dan kualitas produk.	1.	Tanggung jawab produk aspek kesehatan dan keamanan pelanggan: PR1 dan PR2

Analisis dampak:

Pelanggan mengharapkan agar produk dan jasa dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengandung risiko terhadap kesehatan dan keamanan. Upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dari yang menggunakan atau yang menyerahkan produk/jasa, berdampak langsung terhadap reputasi perusahaan, risiko hukum, dan risiko finansial akibat penarikan kembali produk/jasa, diferensiasi pasar terkait dengan kualitas, dan motivasi karyawan.

Sebagai bukti bahwa Indah Kiat memberikan perhatian atas kesehatan konsumen dan juga keamanan produknya, perusahaan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Mutu yang berlaku hingga tahun 2012 untuk *mill* Perawang dan tahun 2013 untuk *mill* Tangerang dan Serang. *Mill* Perawang juga menerima sertifikasi sebagai produk yang ramah lingkungan dan memperoleh sertifikat ISO 9706 untuk kualitas produk dan telah diperbaharui pada tahun 2011. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk kertas yang dihasilkan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga sangat

baik digunakan untuk keperluan pengarsipan dokumen-dokumen penting.

Produk kertas fotocopi Indah Kiat juga mendapatkan sertifikasi SNI dari Badan Sertifikasi Nasional. Dengan adanya sertifikat ini produk Indah Kiat telah memenuhi peraturan keamanan produk sesuai permintaan pasar di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, khususnya terhadap peraturan larangan penggunaan zat-zat berbahaya.

Selain sertifikast ISO, produk kertas pembungkus makanan yang dihasilkan oleh Indah Kiat juga telah memenuhi standar pengujian sehingga memperoleh sertifikasi bagi *Food Packaging Direct Contact* dari Amerika Serikat sejak tahun 2005 dan Isega dari Jerman sejak tahun 2003. Sertifikasi ini menyatakan bahwa produk-produk kertas pembungkus makanan yang diproduksi oleh Indah Kiat aman dari kandungan logam dan bahan kimia yang berbahaya serta tidak menyebabkan migrasi materi kertas ke makanan. Status sertifikasi dari kedua badan ini berlaku hingga tahun 2012.

Sejumlah produk dari *mill* Serang seperti Sinarcard, Sinarfold, Sinarvanda, Sinarplex, Foopak dan lainnya, juga telah memperoleh sertifikasi keamanan produk RoHS dari *European Union* (EU), CONEG–Amerika Serikat, serta dari badan sertifikasi lainnya sejak tahun 2000.

Selain memproduksi berbagai jenis kertas, *mill* Tangerang memproduksi Sinartech atau disebut juga *Quran Paper Product* (QPP) yaitu kertas berkualitas tinggi bagi pencetakan Al-Quran. Dengan spesifikasi kertas berkualitas yang dapat bertahan hingga 100 tahun, Sinartech atau QPP memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2008 dan diperbaharui pada tahun 2010. Sertifikasi yang berlaku 2 tahun ini diperoleh karena kertas ini diproses dengan mengedepankan kehalalan mulai bahan baku, proses produksi, penyimpanan hingga pendistribusian.

Standar internasional untuk manajemen mutu memberikan jaminan bahwa perusahaan secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan permintaan pasar sesuai dengan kebijakan DH/HP/01 mengenai SJH (Sertifikasi Jaminan Halal) dan petunjuk operasional perusahaan DP/OP/01 mengenai produksi kertas.

Tabel 4.19 Implementasi Konsumen Isu *Fair Marketing, Factual and Unbiased Information, and Fair Contractual Practices* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Memberikan informasi mengenai detail produk melalui <i>website</i> perusahaan dan pemberian label pada produk.	1.	Tanggung jawab produk aspek pemasangan label bagi produk dan jasa: PR3 dan PR4

Analisis dampak:

Kecukupan dan kemudahan dalam mengakses informasi tentang dampak keberlanjutan produk dan jasa diperlukan oleh pelanggan dan konsumen akhir untuk membuat keputusan pembelian. Penyediaan informasi dan pemberian label yang tepat sehubungan dengan dampak keberlanjutan, terkait langsung dengan ketaatan terhadap peraturan dan *codes* tertentu (misalnya peraturan perundang-undangan atau *OECD Guidelines on Multinational Enterprises*) dan dengan strategi merek serta diferensiasi pasar. Tampilan dan spesifikasi informasi serta pemberian label produk dan jasa diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal, atau kurangnya implementasi. Disamping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (*non-compliance*) peraturan akan menimbulkan risiko terhadap reputasi, kesetiaan serta kepuasan pelanggan.

Salah satu misi dari Indah Kiat adalah meningkatkan pangsa pasar dunia. Dengan adanya pemberian label pada produk yang dihasilkan oleh Indah Kiat maka konsumen akan mengetahui indikasi mengenai spesifikasi produk tersebut. Hal ini akan berdampak kepada kepuasan pelanggan dan memenuhi permintaan konsumen pada pasar internasional yang sangat memperhatikan informasi detail produk Indah Kiat sebagai dasar pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian.

4.2.7 Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Subjek inti pelibatan dan pengembangan masyarakat ini memiliki isu-isu:

a. *Community Involvement* (Pelibatan Masyarakat)

Pelibatan komunitas merupakan langkah komunikasi proaktif organisasi dalam menyelesaikan masalah, melakukan kemitraan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lokal.

b. *Education and Culture* (Pendidikan dan Kebudayaan)

Pendidikan merupakan dasar bagi semua pembangunan sosial dan ekonomi. Kebudayaan adalah komponen penting dari identitas komunitas.

c. *Employment Creation and Skills* (Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Keahlian)

Dengan penciptaan lapangan kerja, semua organisasi, baik besar maupun kecil, dapat memberikan kontribusi untuk mereduksi kemiskinan dan meningkatkan pengembangan ekonomi.

d. *Technology Development and Access* (Pengembangan dan Akses Teknologi)

Untuk membantu kemajuan ekonomi dan pengembangan sosial, dibutuhkan akses kepada teknologi modern.

e. *Wealth and Income Creation* (Kesejahteraan dan Peningkatan Pendapatan)

Kewirausahaan dan koperasi yang kompetitif merupakan mesin utama dalam menciptakan kesejahteraan komunitas. Organisasi dapat membantu menciptakan lingkungan kewirausahaan bagi masyarakat sekitarnya.

f. *Health* (Kesehatan)

Kesehatan adalah elemen terpenting kehidupan. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat sangat menghambat perkembangan masyarakat.

g. *Social Investment* (Investasi Sosial)

Perusahaan diharapkan membuat investasi sosial terkait dengan pendidikan, pelatihan, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya.

Tabel 4.20 Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu *Education and Culture* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Menyediakan beasiswa bagi masyarakat pada tingkat sekolah sampai dengan Universitas.	1.	Ekonomi aspek kehadiran pasar tenaga kerja: EC7
2.	Program Pendidikan	2.	Ekonomi aspek dampak ekonomi tidak langsung: EC8 dan EC9
	a. Membangun perpustakaan dan laboratorium	3.	Masyarakat aspek komunitas: S01
	b. Pemberian insentif bagi karyawan yang menjadi tenaga pengajar		
	c. Menyumbangkan buku tulis, peralatan sekolah, dan buku untuk perpustakaan		
	d. Menyediakan bus sekolah		
	e. Menyumbangkan peralatan olah raga		
	f. Mengembangkan “Rumah Pintar” bersama dengan SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu)		

Analisis dampak:

1. Beasiswa

Pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Indah Kiat adalah kepada siswa berprestasi tetapi memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka akan berdampak pada kelancaran proses bisnis perusahaan.

2. Program pendidikan

Stakeholder pada perusahaan memiliki ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan dalam mengelola dampak pada komunitas masyarakat. Dengan demikian, memiliki sistem manajemen yang dapat diandalkan dapat meningkatkan nama dan reputasi organisasi sebagai sebuah rekan potensial.

Salah satu prioritas perusahaan dalam kontribusi sosialnya adalah turut meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasinya

Universitas Indonesia

dengan menyediakan akses serta membuka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam *Declaration of Sustainability* pada bidang sosial dan ekonomi (lihat lampiran 6). Selain menghasilkan dan mendistribusikan nilai ekonomi, perusahaan dapat mempengaruhi perekonomian melalui investasi dalam infrastruktur. Pengaruh investasi infrastruktur dapat lebih luas dari jangkauan operasi bisnis dan dinikmati dalam periode panjang.

Melalui adanya berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan ini, Indah Kiat juga menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar *mill* yang berdampak pada kelancaran kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu kegiatan-kegiatan ini juga merupakan salah satu cara bagi Indah Kiat dalam menjalankan visi perusahaan yaitu memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Tabel 4.21 Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu *Health* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Program kesehatan: a. Menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar <i>mill</i> b. Mengadakan pelatihan bagi petugas kesehatan masyarakat c. Menyediakan fasilitas berupa pengobatan keliling d. Memberikan kampanye demam berdarah serta melakukan pengasapan (<i>fogging</i>) e. Menyediakan pasokan air bersih, saran kebersihan, dan akses untuk air bersih f. Kampanye anti HIV/AIDS dan anti Narkoba	1. 2. 3.	Tenaga kerja aspek kesehatan dan keselamatan kerja: LA8 Masyarakat aspek komunitas: S01 Ekonomi aspek ekonomi tidak langsung: EC8

Analisis dampak:

Pencegahan penyakit berat menyumbang peranan penting terhadap kesehatan dan membantu mempertahankan kelayakan sosial perusahaan untuk beroperasi di suatu daerah atau masyarakat. Indah Kiat melaksanakan berbagai

Universitas Indonesia

jenis program kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat sekitar dan meminimalisir terjadinya epidemi.

Untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat, Indah Kiat menyediakan pasokan air bersih, sarana kebersihan, dan akses air bersih untuk masyarakat yang belum memilikinya. Perusahaan juga melakukan kampanye anti HIV/AIDS untuk masyarakat umum, terutama kalangan pelajar, yang disertai dengan kampanye anti narkoba untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai kedua hal yang relatif penting bagi kalangan pelajar di sekitar lokasi operasi.

Tabel 4.22 Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu *Employment Creation and Skills* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat: a. Program “ <i>Creative Craft</i> ” b. Pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan	1.	Masyarakat aspek komunitas: S01
		2.	Ekonomi aspek kinerja ekonomi: EC1
		3.	Ekonomi aspek dampak ekonomi tidak langsung: EC8 dan EC9

Analisis dampak:

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh Indah Kiat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat sekitar serta menyediakan sumber daya untuk membantu pengembangan usaha-usaha skala mikro serta perwujudan komitmen perusahaan untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Program-program ini ditujukan untuk menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan standar kehidupan mereka dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan *Declaration of Sustainability* pada bidang sosial dan ekonomi (lihat lampiran 6).

Tabel 4.23 Implementasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Isu *Technology Development and Access* Serta *Social Investment* dan Indikator Kinerja GRI

Implementasi ISO 26000		Pelaporan dan Pengungkapan	
No.	Kegiatan CSR	No.	Indikator Kinerja
1.	Program lain-lain: a. Memberikan pasokan listrik ke desa-desa di sekitar <i>mill</i> b. Memperbaiki jalan raya c. Sunatan massal d. Melakukan penghijauan di sekitar <i>mill</i> e. Menjadi donatur pada perayaan hari besar agama dan nasional bagi masyarakat di sekitar <i>mill</i> f. Memberikan bantuan kepada panti jompo	1.	Masyarakat aspek komunitas: S01
		2.	Ekonomi aspek kinerja ekonomi: EC1
		3.	Ekonomi aspek dampak ekonomi tidak langsung: EC8 dan EC9

Analisis dampak:

Dampak atas kegiatan-kegiatan ini adalah terciptanya hubungan baik antara perusahaan dengan komunitas masyarakat sehingga dengan adanya hubungan yang baik ini maka akan berdampak langsung pada kelancaran kegiatan di dalam perusahaan sesuai dengan *Declaration of Sustainability* pada bidang sosial dan ekonomi (lihat lampiran 6) dan juga terhadap citra perusahaan.

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk adalah bagian dari Grup Asia Pulp and Paper yang merupakan perusahaan manufaktur yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku utama dalam menjalankan proses bisnisnya untuk memproduksi kertas dan bubur kertas. Indah Kiat menggunakan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan CSR dan standar *Global Reporting Initiative* dalam melaporkan dan mengungkapkan kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Kegiatan CSR sesuai dengan ISO 26000

Kegiatan-kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Indah Kiat telah sesuai dengan prinsip-prinsip CSR yang ada pada ISO 26000 dengan memenuhi ketujuh subjek inti yang terdapat pada ISO 26000. Selain itu Indah Kiat juga telah menjalankan kegiatan CSR sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

2. Melaporkan kegiatan CSR sesuai dengan standar GRI

Melalui kegiatan CSR yang dilakukan, Indah Kiat menunjukkan perilaku etis perusahaan dengan menghormati kepentingan masyarakat dan karyawan, mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara internasional maupun yang berlaku di Indonesia serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan melaporkan seluruh kegiatan CSR yang dilaksanakan dalam *annual report* dan *sustainability report* bersama dengan APP. *Sustainability report* yang diterbitkan oleh Indah Kiat bersama dengan APP melaporkan implementasi dari ISO 26000 sesuai dengan standar GRI.

Selain untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan, manfaat yang didapat dari kegiatan CSR yang dilakukan adalah terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholder* sehingga perusahaan dapat menjaga kelancaran kegiatan bisnisnya, mereduksi biaya risiko dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak pada kemudahan bagi perusahaan menembus pangsa pasar Internasional seperti Amerika, Eropa, Jepang dan negara-negara Asia lainnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengumpulan data mengenai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan CSR dan waktu penyesuaian untuk menggali data yang dimiliki lebih dalam dengan anggota tim CSR Indah Kiat dan juga APP sehingga penulis hanya dapat mewawancarai dua orang tim CSR Indah Kiat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan salah satu dari anggota tim CSR APP untuk mengetahui kebijakan dan dasar-dasar yang digunakan Indah Kiat dalam melaksanakan kegiatan CSR.

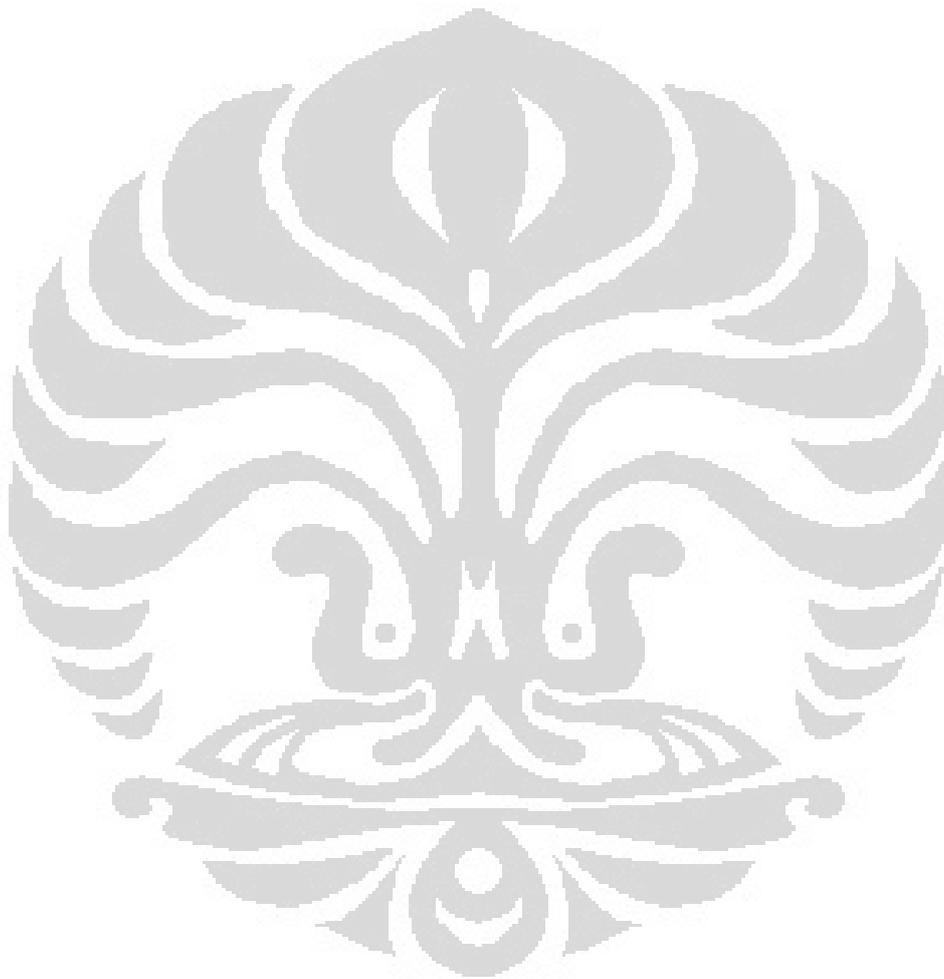
Keterbatasan lainnya di dalam melakukan penelitian ini adalah *sustainability report* Indah Kiat yang diterbitkan bersama dengan APP untuk tahun 2010/2011 sedang dalam proses pembuatan sehingga penelitian ini menggunakan *Annual Report* PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk tahun 2011 dan *Sustainability Report* Asia Pulp and Paper 2008/2009.

5.3 Saran

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat dilaporkan dan diungkapkan secara garis besar pada *annual report* yang diterbitkan oleh perusahaan dan tidak mengetahui hasil dari kegiatan CSR yang dilakukan. Selain melalui *annual report*, perusahaan juga melaporkan dan mengungkapkan secara terpisah kegiatan CSR pada *sustainability report*. Tetapi tidak seluruh indikator kinerja dari kegiatan CSR Indah Kiat yang diungkapkan dan dilaporkan pada *sustainability report* tersebut sehingga *stakeholder* tidak dapat mengetahui keberhasilan dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat secara lebih detail. Hal ini disebabkan *sustainability report* yang diterbitkan tidak hanya melaporkan dan mengungkapkan kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat saja tetapi juga perusahaan *pulp and paper* lain yang dimiliki oleh APP sebagai induk perusahaan. Indah Kiat juga tidak memiliki *website* sebagai akses bagi *external stakeholder* untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Untuk itu penulis memberikan saran agar Indah Kiat menerbitkan *sustainability report* terpisah dari APP atau menjelaskan lebih detail masing-

masing indikator kinerja untuk Indah Kiat jika memang menggabungkan pelaporan dan pengungkapannya di dalam *sustainability report* bersama dengan APP. Penulis juga menyarankan agar Indah Kiat memiliki *website* sendiri sebagai akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui implementasi kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indah Kiat dan juga sebagai salah satu media komunikasi antara Indah Kiat dengan konsumen sebagai salah satu *stakeholder* yang dimiliki oleh perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2006). CSR di Indonesia. *Mix* , pp. 17-20.
- Ambadar, J. (2008). *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam praktik di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asia Pulp and Paper. (2010). *APP Sustainability Report 2008/2009*. Jakarta.
- Brew, P. (2007). CSR benefits for the community. *International conference on CSR*. Denpasar.
- Budimanta, A., Prasetijo, A., & Rudito, B. (2008). Corporate social responsibility: Alternatif bagi pembangunan Indonesia. *Indonesia Center for Sustainable Development* .
- Cahyowati, T. D. (2010). *Modul pemasaran sosial*. Mei 7, 2012, Universitas Mercubuana: <http://tri.diah.staff.mercubuana.ac.id/dl.php>
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons* , 34, 39-48.
- Corporate social responsibility*. (2008). Mei 10, 2012, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
- Djarmiko, H. E. (2001). Saatnya menjadi perusahaan terpercaya. *SWA* , pp. 1-3.
- Domenec, M., & Guillen, M. (2006). The intellectual evolution of strategic management and its relationship with ethics and social responsibility. *IESE Business School University of Navarra* .
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assesment and review. *The Academy Of Management Review* , 14, 57-74.
- Global Reporting Initiative. (2010). *GRI dan ISO 26000: Bagaimana menggunakan panduan GRI bersama dengan ISO 26000* . April 20, 2012, <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Bahasa-Indonesian-GRI-ISO-2010.pdf>
- Global Reporting Initiative. (2006). *Pedoman laporan keberlanjutan*. April 25, 2012, <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Bahasa-Indonesia-G3-Reporting-Guidelines.pdf>

- Global Reporting Initiative. (2006). *Set Protokol Indikator*. April 25, 2012, <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Bahasa-Indonesia-G3-Economic-Indicator-Protocols.pdf>
- Gond, J. P., & Moon, J. (2011). Corporate social responsibility in retrospect and prospect: Exploring the life-cycle of an essentially contested concept. *Nottingham University Business School* .
- Hartanti, D. (2006). Makna corporate social responsibility: Sejarah dan perkembangannya. *Economics Business and Accounting Review* , 3, 113-120.
- Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (2000). *Accounting theory (5th ed)*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Henningfield, J., Pohl, M., & Tolhurst, N. (2006). *The ICCA handbook on corporate social responsibility*. New York: John Wiley and Sons.
- Hitt, M. A., & Ireland, R. D. (2011). *The management of strategy concepts and cases (9th ed)*. Ohio: Thomson South-Western.
- Holme, & Watts, R. (2000). *Corporate social responsibility: Making good business sense*. Mei 8, 2012, The World Business Council for Sustainable Development: <http://www.wbcd.org/web/publications/csr2000.pdf>
- Hopkins, M. (2004). Corporate social responsibility: An issues paper. *Policy Integration Department World Commission on the Social Dimension of Globalization International Labour Office* .
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- International Finance Corporation. (2007). *Environmental, health, and safety guidelines for printing*. London: IFC.
- International Organization for Standardization. (2010). *Draft international standard ISO/DIS 26000: Guidance on social responsibility*. April 26, 2012, http://www.mdos.si/File/ISO_FDIS_26000_final%20draft.pdf
- Jalal. (2007). *CSR Indonesia news letter: Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang kontroversial itu*. Februari 28, 2012, <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20100329054244-a.pdf>

- Jalal. (2010). *Pembangunan berkelanjutan, CSR, dan ISO 26000*. Februari 29, 2012, Lingkar Studi CSR: <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20100329054244-a.pdf>
- Jalal. (2011). *Identifikasi, analisa, dan pembuatan profil pemangku kepentingan*. Maret 3, 2012, Lingkar Studi CSR: <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110524035840-a.pdf>
- Jalal. (2011). *Konsep dan teori pemangku kepentingan*. Februari 2008, 2012, Lingkar Studi CSR: <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110524034731-a.pdf>
- Jalal. (2011). *Manajemen pemangku kepentingan pemetaan dan pembinaan hubungan*. Februari 28, 2012, Lingkar Studi CSR: <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110419153919-a.pdf>
- Jalal. (2012). *Pembangunan berkelanjutan, pelaporan berkelanjutan, standar GRI G3.1, dan GRI FPPS*. Februari 29, 2012, Lingkar Studi CSR: <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20120416081952-a.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure*. April 25, 2012, Harvard Business School: <http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf>
- Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara. (2007). *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. No. Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan*.
- Kiroyan, N. (2006). *CSR harus diregulasi? SWA*, pp. 24-26.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance di Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Kotler, P., & Nancy, L. (2005). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Moir, L. (2001). *What do we mean by corporate social responsibility, the measurement of corporate social behavior*. *Journal of Corporate Governance*, 22, 16-22.

- Murray, K. B., & Vogel, C. M. (1997). Using a hierarchy-of-effects approach to gauge the effectiveness of corporate social responsibility to generate goodwill towards the firm: Financial versus nonfinancial impacts. *Journal of Business Research* , 38, 141-159.
- Murray-Webster, R., & Simon, P. (2006). *Making sense of stakeholder mapping*. Februari 28, 2012, PM Worl Today: <http://skat.ihmc.us/rid/pdf>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2011). *OECD guidelines for multinational enterprises*. April 26, 2012, <http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf>
- Pemangku kepentingan*. (2011). Mei 10, 2012, Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan
- Prayogo, D. (2008). *Konflik antara korporasi dengan komunitas lokal: Sebuah kasus empirik pada industri geotermal di Jawa Barat*. FISIP UI Press.
- PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. (2011). *Laporan Tahunan 2011*. Jakarta.
- Radyati, M. (2012). *Arti pemangku kepentingan bagi perusahaan* . Februari 29, 2012, Universitas Trisakti: <http://mmcsrusakti.org/node/800>
- Radyati, M. (2008). *CSR untuk pemberdayaan ekonomi lokal*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Radyati, M. (2012). *Pemangku kepentingan dan penentuan strategi*. Feruari 25, 2012, Universitas Trisakti: <http://mmcsrusakti.org/node/865>
- Ratnasari, Y., & Prastiwi, A. (2010). *Pengaruh corporate governance terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam sustainability report*. April 24, 2012, Universitas Diponegoro: http://eprints.undip.ac.id/28629/2/yunita_c2c007141.pdf
- Riyadi, E. S. (2008). Landasan teoritis bagi tanggung jawab sosial perusahaan: Dari pemegang saham (shareholder) hingga pemangku kepentingan (stakeholder). *Dignitas* , V, pp. 63-95.
- Rosmasita, H. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial (sosial disclosure) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sejarah CSR*. (n.d.). Februari 28, 2012, <https://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf>
- Sekilas CSR*. (n.d.). Februari 28, 2012, <http://csrjatim.org/2/data/sekilas-csr.pdf>

- Suharto, E. (2008). Corporate social responsibility: What is and benefits for corporate. *Seminar dua hari CSR: Strategy, Management, and Leadership*. Jakarta.
- Sukada, S. (2007). *Membumikan bisnis berkelanjutan: Memahami konsep & praktik tanggung jawab sosial perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Suprpto, P. (2006). Peran BUMN dalam pengembangan usaha kecil. *Lokakarya CSR bidang lingkungan Fakultas Kehutanan IPB*. Bogor.
- Susanto, A. (2007). *Corporate social responsibility: A strategic management approach*. Jakarta: The Consulting Group.
- Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R., & Soembodo, B. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (n.d.).
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep dan aplikasi corporate social responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Wisniarti, T. (2006). CSR dan prospek CSR bidang lingkungan di masa depan . *Lokakarya CSR bidang lingkungan Fakultas Kehutanan IPB*. Bogor.
- Witoelar, R. (2005). Sustainability reporting: Arti penting bagi perusahaan dan bagaimana peran akuntan. *Media Akuntansi* , pp. 47-51.
- www.asiapulpaper.com
- www.csrequest.net
- www.globalreportinginitiative.org

Lampiran 1: Indikator Kinerja Ekonomi *Global Reporting Initiative*

Economic	
Performance Indicator	Description
Economic performance	
EC1	Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.
EC2	Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.
EC3	Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.
EC4	Significant financial assistance received from government.
Market presence	
EC5	Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation.
EC6	Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.
EC7	Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation.
Indirect economic impacts	
EC8	Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.
EC9	Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

Lampiran 2: Indikator Kinerja Lingkungan *Global Reporting Initiative*

Environmental	
Performance Indicator	Description
Materials	
EN1	Materials used by weight or volume.
EN2	Percentage of materials used that are recycled input materials.
Energy	
EN3	Direct energy consumption by primary energy source.
EN4	Indirect energy consumption by primary source.
EN5	Energy saved due to conservation and efficiency improvements.
EN6	Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives.
EN7	Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.
Water	
EN8	Total water withdrawal by source.
EN9	Water sources significantly affected by withdrawal of water.
EN10	Percentage and total volume of water recycled and reused.
Biodiversity	
EN11	Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.
EN12	Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.
EN13	Habitats protected or restored.
EN14	Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.
EN15	Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.
Emissions, effluents and waste	
EN16	Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.
EN17	Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.
EN18	Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.
EN 19	Emissions of ozone-depleting substances by weight.
EN 20	NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight.
EN 21	Total water discharge by quality and destination.

Lampiran 2: Indikator Kinerja Lingkungan *Global Reporting Initiative* (Lanjutan)

EN22	Total weight of waste by type and disposal method.
EN23	Total number and volume of significant spills.
EN24	Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.
EN25	Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization's discharges of water and runoff.
Products and services	
EN26	Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.
EN27	Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.
Compliance	
EN28	Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations.
Transport	
EN29	Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's operations, and transporting members of the workforce.
Overall	
EN30	Total environmental protection expenditures and investments by type.

Lampiran 3: Indikator Kinerja Sosial *Global Reporting Initiative*

Performance Indicator	Description
Employment	
LA1	Total workforce by employment type, employment contract, and region, broken down by gender.
LA2	Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and region.
LA3	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.
LA15	Return to work and retention rates after parental leave, by gender.
Labor/management relations	
LA4	Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.
LA5	Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective agreements.
Occupational health and safety	
LA6	Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advised on occupational health and safety programs.
LA7	Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region and by gender.
LA8	Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.
LA9	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.
Training and education	
LA10	Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.
LA11	Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.
LA12	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender.
Diversity and equal opportunity	
LA 13	Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.

Lampiran 3: Indikator Kinerja Sosial *Global Reporting Initiative* (Lanjutan)

Performance Indicator	Description
Employment	
LA1	Total workforce by employment type, employment contract, and region, broken down by gender.
LA2	Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and region.
LA3	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.
LA15	Return to work and retention rates after parental leave, by gender.
Labor/management relations	
LA4	Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.
LA5	Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective agreements.
Occupational health and safety	
LA6	Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advised on occupational health and safety programs.
LA7	Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region and by gender.
LA8	Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.
LA9	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.
Training and education	
LA10	Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.
LA11	Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.
LA12	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender.
Diversity and equal opportunity	
LA 13	Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.

Lampiran 3: Indikator Kinerja Sosial *Global Reporting Initiative* (Lanjutan)

Equal remuneration for women and men	
LA14	Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation.
Investment and procurement practices	
HR1	Percentage and total number of significant investment agreements and contracts that include clauses incorporating human rights concerns, or that have undergone human rights screening.
HR2	Percentage of significant suppliers, contractors and other business partners that have undergone human rights screening, and actions taken.
HR3	Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained.
Non-discrimination	
HR4	Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.
Freedom of association and collective bargaining	
HR5	Operations and significant suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and actions taken to support these rights.
Child labor	
HR6	Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor.
Prevention of forced and compulsory labor	
HR7	Operations and significant suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor.
Security practices	
HR8	Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.
Indigenous rights	
HR9	Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.
Assessment	
HR10	Percentage and total number of operations that have been subject to human rights reviews and/or impact assessments.

Lampiran 3: Indikator Kinerja Sosial *Global Reporting Initiative* (Lanjutan)

Remediation	
HR11	Number of grievances related to human rights filed, addressed and resolved through formal grievance mechanism.
Local communities	
SO1	Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs.
SO9	Operations with significant potential or actual negatif impacts on local communities.
SO10	Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant potential or actual negatif impacts on local communities.
Corruption	
SO2	Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.
SO3	Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures.
SO4	Actions taken in response to incidents of corruption.
Public policy	
SO5	Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.
SO6	Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.
Anti-competitive behavior	
SO7	Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.
Compliance	
SO8	Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations.
Customer health and safety	
PR1	Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures.
PR2	Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.
Product and service labeling	
PR3	Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements.

Lampiran 3: Indikator Kinerja Sosial *Global Reporting Initiative* (Lanjutan)

PR4	Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes.
PR5	Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.
Marketing communications	
PR6	Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.
PR7	Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes.
Customer privacy	
PR8	Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.
Compliance	
PR9	Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.



LABOR POLICY

APP, as one of the largest employers in Indonesia, values and respects its relationship with its employees. Therefore, a certain standard of labor policy has been set up to maintain good relationship between APP and its employees in a mutual effort to elevate the employees' prosperity and APP's sustainability.

APP Labor Policy includes the following:

- APP commits to follow all employment laws and regulation required in Indonesia which is amongst other Law No. 13 Year 2003 regarding Labor. Indonesia is a member of International Labor Organization (ILO) and has ratified *inter alia* eight of ILO fundamental Conventions.
- APP commits that it only works with the contractors that follow their applicable employment laws and regulation.
- APP does not tolerate any kind of harassments and discriminations in its employment practices whether it is based on gender, ethnicity, religion or race.
- APP respects its employees' rights to form, join or not to join labor associations as regulated in, amongst other Law No. 83 Year 1998 regarding the Ratification of ILO's Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention 1948 and commits to maintain good communication with its employees whether directly or indirectly, through their labor associations.
- APP does not accept nor condone any form of forced labor in its employment practices as regulated in, amongst other Law No. 19 Year 1999 regarding the Ratification of ILO's Abolition of Forced Labor Convention 1957.
- APP fully supports and strictly adheres to child labor laws including the applicable law of minimum age which is regulated in, amongst other Law No. 20 Year 2003 regarding the Ratification of ILO's Minimum Age Convention 1993 and Law No. 1 Year 2000 regarding the Ratification of ILO's Worst Forms of Child Labor Convention 1999.
- APP strives to protect its employee's health and safety in accordance to the applicable law and regulation, including amongst other, Law No. 1 Year 1970

Universitas Indonesia

regarding Work Safety, Law No. 3 Year 1992 regarding Labor's Social Security and Governmental Regulation No. 14 Year 1993 regarding Labor's Social Security.

- APP cares for the wellbeing of its employees by providing them with health and medication facilities and services.
- APP puts employee skills and knowledge improvement as one of its highest priorities, therefore various training and education opportunities are provided to its employees.
- APP respects and protects its employees' human rights and commits to a sustainable operation that balances social, environmental and economic needs.

If you need additional information or clarification, please contact us at environment@app.co.id

Updated July 29 2009

Asia Pulp & Paper (APP)
Jakarta, Indonesia

APP reserves the right to amend this labor policy at any time. Nothing in this labor policy expresses or implies that a contract between APP and its employees is a guarantee of continued employment with APP.

Lampiran 5: *California Transparency Law***STATEMENT - California Transparency Law**

January 2012: Asia Pulp & Paper Group (APP) would like to state that its Labor and Human Rights practices are inline with the U.S. California Transparency Law on Human Trafficking (U.S. Senate Bill: 657) and would like to further highlight its commitment to the protection and respect of human rights across all of its operations, both in Indonesia and internationally.

The new U.S. legislation is designed to enact the California Transparency in Supply Chains Act of 2010, and will, from January 1, 2012, require retail sellers and manufacturers doing business in the state to disclose their efforts to eradicate slavery and human trafficking from their direct supply chains for tangible goods offered for sale, as specified.

APP is committed to compliance with all laws and regulations in Indonesia on ethical labor practices. APP does not condone any form of forced labor in its employment practices and actively strives to protect its employees' health and safety, in line with existing laws and regulations. Indonesia is a member of the International Labor Organization (ILO) and has ratified eight of the organization's fundamental conventions.

Last year, APP also began the process of adopting the 'Protect, Respect and Remedy' framework endorsed by United Nations Human Rights Council (UNHRC) as the guiding principles for business on human rights performance.

The UN guidelines focus on due diligence as the first core principle and critical step for corporations. In line with this, APP has appointed international auditing organization Mazars to independently assess existing stated policies, principles and performance across the company's corporate operations, eight Indonesian pulp and paper mills and supply chain.

In addition, APP regularly discloses its implementation of Human Rights Principles on the ground through its Sustainability Report, which is based on the Global Reporting Initiatives (GRI) standard. APP's most recent Sustainability Report achieved an A+ level, the highest level of transparency based on the GRI standard.

APP welcomes all initiatives to ensure the protection of human rights and will continue to enhance its own measures to protect and promote the welfare of personnel employed across all levels of its operations. Beyond this, APP welcomes the opportunity to contribute to the creation of domestic and international policies to support the further protection of human rights.

Ends



Declaration of Sustainability

One of the world's largest, vertically integrated pulp and paper companies, APP is recognized internationally for the quality of its paper products. With current annual combined pulp, paper and packing grades capacity of more than seven million tons in Indonesia, APP ranks as the number-one producer in Asia, outside of Japan. Headquartered in Jakarta, APP currently has multiple manufacturing facilities in Indonesia and markets its products in more than 65 countries on six continents.

Our vision is to become the 21st Century's premiere, world-class pulp and paper manufacturer – a company dedicated to providing superior value to customers, shareholders, employees and the community.

To fulfil this vision, APP has committed itself to being socially, environmentally and economically sustainable in all its operations. APP will keep this commitment by helping to empower people in the communities where we operate, initiating conservation programs to protect biodiversity and the environment, increasing the use of sustainable forest management certified material, adopting best practices in our mill operations to continually reducing greenhouse gas emissions, and by dedicating ourselves company-wide to continuous improvement.

This statement has been developed as part of APP's commitment to sustainability and good governance in all its operations. The meaning of sustainability to APP is the balance of economic, environmental and social interests throughout the pulp and paper-making supply chain.

On *environmental sustainability*, we believe that continuous improvements in raw material sourcing and utilization, process efficiency, waste minimization and supply chain management are core disciplines in achieving decreased carbon emissions and a better environment. Following national protocols as the baseline, we believe in protecting high conservation value areas of forest that are identified

Universitas Indonesia

as home to endangered species of wildlife and plants or as important to local communities.

On *social sustainability*, we are committed to respecting and protecting human rights and will enforce this commitment within our own operations and our supply chain. Our long-term aim is to contribute to active development of the communities in which we operate. We will endeavour to make our operations transparent to stakeholders respecting the cultural contexts in which we operate.

On *economic sustainability*, we have a responsibility to our employees and their families, our customers and the communities who depend on APP for their incomes and livelihoods. The responsible development of the pulp and paper industry is integral to the future prosperity of the communities and countries in which we operate.

To achieve sustainability, APP commits to the following:

- Unequivocal compliance with national and local laws and relevant international regulations;
- Zero tolerance for illegal wood in our supply chain means maintaining robust standards for fiber suppliers through APP's Fiber Procurement Policy covering environmental standards, conservation principles and social impact;
- Continuing to support forest certification as a market mechanism to promote the responsible management of the world's working forests and increasing the use of sustainable forest management certified material;
- Minimizing pollution from operations and benchmarking processes against international best practice, as well as continuing to minimize energy use, carbon emissions and its resulting environmental impacts, including enforcing APP's "No Burn" policy;
- Continuing investment in recycling technology and promoting efficient uses of recyclable resources;
- Improving the safe handling and storage of raw materials, process intermediates, chemicals, products and waste;
- Continuing to explore innovative ways of recycling the waste products that arise from paper-making;

- Introducing the best available technology that ensures maximum efficiency, but also enables progress toward the goal of supporting local communities through employment opportunities and development programs;
- Implementing detailed operational unit guidelines to manage emergency and social conflict situations, should these arise; and
- Investing further in employees through training and education.

These commitments have been developed by listening to our stakeholders and consulting experts in a variety of professional fields. This has taken place with the recognition that the balance of the three sustainability pillars – environmental, social and economic – are required for the long-term success of our business and for the long-term needs of the communities and forested areas in which we operate and around the world. We recognize these commitments must be verified and regularly checked by independent bodies.

This statement is supported by APP's technical documents and relevant certifications. Should our stakeholders need further information on APP's Sustainability, please do not hesitate to contact us or go to our website — www.asiapulppaper.com

Jakarta, 2004

APP
Asia Pulp & Paper

Last Updated: January 2009

Lampiran 7: Kebijakan Legalitas



Legality and Sustainability Certification Policy
In Support of Green Purchasing Law Implementation

Japan's Green Purchasing Law (GPL) was revised on April the 1st 2006. The new regulations were drawn up by the Japanese government to certify the legality and sustainability aspects of pulpwood, as the raw material of virgin pulp.

APP recognizes that in business dealings with customers it is often required to conform to different norms and standards. Certain standards, however, as set out in GPL Standard Procedure, are universally applicable. As one of the larger suppliers of finished paper products to Japan, APP recognizes the importance of implementing these Standard Procedures according to GPL guidelines. These guidelines conform to the Green Purchasing Method established by Ministry of the Environment of Japan, which has been adapted to meet the expectations of the market in Japan.

In January 2007, APP's mills began implementing internal procedures to comply with GPL. Mill management and staffs understand that the purpose of GPL legality and sustainable source certification is to demonstrate that APP has an unbroken chain-of-custody from the source of the raw material through the mill to the sale to a customer. There are three methods by which a supplier can certify its production. To begin with, APP will use the self-certification method as proscribed under the terms of the GPL.

APP will review this Policy on a regular basis and will introduce revisions when and where necessary. This Policy will also be subjected to scrutiny and will be revised according to relevant multi-stakeholders' input. All stakeholders are invited to contribute to the further development of this Policy.

Jakarta, 2007

APP

Sinarmas Pulp and Paper Products

Last Updated: January 2007